

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
INSPEKTORAT DAERAH**



---

**IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN  
SEMESTER I TAHUN 2022**

---

**Nomor** : 700 / 424 / 11

**Tanggal** : 9 Agustus 2022

## KATA PENGANTAR

Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2022 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan ini menggambarkan kegiatan dan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun Anggaran 2022 mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit dan penyelesaian temuan pengawasan/tindaklanjut temuan hasil audit.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar dalam pelaksanaan pengawasan lebih optimal, terpadu dan sinergi sehingga didapatkan hasil pengawasan/mekanisme kontrol yang maksimal.

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2022 ini tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, oleh karena itu upaya perbaikan akan terus kami laksanakan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**RINGKASAN UNTUK PIMPINAN**  
**LAPORAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
**SEMESTER I TAHUN 2022**

Menurut Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anticorruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam rangka melaksanakan peran-peran di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan pengawasan selama semester I tahun 2022, yang telah direncanakan dalam SK Bupati Klaten Nomor 700/ 339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan juga pengawasan yang dilaksanakan diluar PKPT tahun 2022. Berikut kegiatan pengawasannya:

1. Audit Kinerja  
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 1 audit kinerja.
2. Audit Kepatuhan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit kepatuhan terhadap 12 Desa di Kabupaten Klaten.
3. Audit dengan Tujuan Tertentu.  
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 14 audit dengan tujuan tertentu.



#### 4. Klarifikasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 5 klarifikasi.

#### 5. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi terhadap:

- a. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) pada 12 OPD Tahun 2021;
- b. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TA 2022;
- c. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 51 OPD;
- d. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 47 OPD dan UPT;
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada 7 OPD;
- f. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022.

#### 6. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan reviu terhadap:

- a. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III Tahun 2021 pada 7 OPD;
- b. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2021 pada 1 OPD;
- c. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2021;
- e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;
- g. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2023;
- h. Reviu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan TA 2021 pada 1 OPD.



## 7. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring terhadap:

- a. Monitoring pelaksanaan stock opname vaksin covid19;
- b. Monitoring stok opname dan pemantauan tindak lanjut hasil stok opname;
- c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan pada 13 Desa;
- d. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif;
- e. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja;
- f. Monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021;
- g. Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) tahun 2022;

## 8. Pendampingan/ Consulting

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

- a. Pendampingan pelaksanaan pelaporan LHKPN;
- b. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui alamat <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> kepada 51 OPD;
- c. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada 47 OPD dan UPT;
- d. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- e. Telaah seawat ekstern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
- f. Perhitungan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan kas desa dan pengelolaan asset TA 2019-2021 di Desa Bendo Kecamatan Pedan;
- g. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
- h. Narasumber pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Tulung.

Kegiatan pada point a-d telah dilaksanakan, akan tetapi laporan pendampingan kegiatan tersebut belum tersedia.

#### 9. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2021. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 360 temuan dan rekomendasi sebanyak 888 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester I tahun 2022 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 821 dari 888 rekomendasi ( 92,45%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 62 dari 888 rekomendasi (6,98%)
- c. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 5 dari 888 rekomendasi (0,57%)

#### 10. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Pada semester I tahun 2022 tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah dilakukan pada 14 rekomendasi dari 60 rekomendasi, pada 13 objek pemeriksaan audit kepatuhan dan audit kinerja.

#### 11. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Pada semester I tahun 2022 terdapat 6 (enam) aduan masyarakat, 3 aduan status selesai dengan klarifikasi, dan 3 aduan lainnya dilanjutkan dengan audit investigasi.

#### 12. Kegiatan Pengawasan lainnya

- a. Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MCP Korsupgah);
- b. Pengendalian Gratifikasi;
- c. Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. *Whistleblowing system*;
- e. Penanganan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- f. Peningkatan Maturitas terintegritas SPIP;

- g. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- h. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Demikian ringkasan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Klaten, 9 Agustus 2022

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KLATEN



JAJANG PRIHONO, S.STP.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19810216 199912 1 001

Tembusan. disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Klaten



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
BAB II HASIL PENGAWASAN .....	3
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT .....	15
BAB IV SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI .....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan.....	2
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Audit Kinerja.....	3
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Audit Kepatuhan.....	3
Tabel 2. 3 Daftar Obyek Pemeriksaan Audit.....	4
Tabel 2. 4 Daftar OPD Evaluasi MR.....	6
Tabel 2. 5 Daftar OPD Evaluasi SAKIP.....	6
Tabel 2. 6 Daftar OPD Evaluasi PMPRB.....	7
Tabel 2. 7 Daftar OPD dan UPT Evaluasi PMPZI.....	7
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Laporan Gratifikasi UPG Kabupaten Klaten.....	12
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah.....	15

## **BAB I**

### **INFORMASI UMUM**

#### **A. Dasar Hukum**

Inspektorat Kabupaten Klaten dibentuk dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.

#### **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Inspektur kemudian berturut turut di bawahnya adalah:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi
  - a. Ka.Subbagian Perencanaan
  - b. Ka.Subbagian Analisis dan Evaluasi
  - c. Ka.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau Jabatan Pelaksana.

#### **C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan**

Laporan Ikhtisar Hasil Pelaporan ini disusun dalam rangka penyajian data kepada pemimpin organisasi (Bupati) untuk bahan evaluasi dan bahan pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah daerah yang akan ditetapkan pada tahun-tahun selanjutnya.



#### D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan**  
**Tahun 2022**

No	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan	PKPT		NON PKPT	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Audit Kinerja	1	1	-	-
2	Audit Kepatuhan	16	12	-	-
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	14	11	-	6
4	Klarifikasi	3	3	-	2
5	Evaluasi	25	24	-	-
6	Reviu	64	14	-	-
7	Monitoring	10	4	-	15
8	Pendampingan	7	4	-	4

Kegiatan pada nomor 8 telah dilaksanakan, akan tetapi laporan pendampingan kegiatan tersebut belum tersedia.

#### E. SUMBER DAYA

Gambaran sumber daya yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebesar Rp15.599.282.078,00.
- b. APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebesar Rp2.726.294.910.709,00.
- c. Jumlah pegawai sebanyak 66 orang yang terdiri dari:
  - 44 orang auditor;
  - 5 orang P2UPD;
  - 8 orang pejabat struktural;
  - 6 orang pelaksana;
  - 2 orang pranata Komputer;
  - 1 orang arsiparis.
- d. Jumlah objek pengawasan terdiri dari :
  - OPD sebanyak 51
  - Desa sebanyak 391
  - Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1
  - Puskesmas sebanyak 34
  - Sekolah Dasar sebanyak 660
  - Sekolah Menengah Pertama sebanyak 65
  - BUMD sebanyak 5

## BAB II

### HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2022 didasarkan pada SK Bupati Klaten Nomor 700/ 339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 maupun non PKPT. Hasil Kegiatan pengawasan meliputi:

#### A. Audit Kinerja

Dilaksanakan 1 audit kinerja dengan nilai kegiatan yang diawasi sebesar Rp11.218.560.037,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Audit Kinerja**  
**Semester I Tahun 2022**

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1	1	2.700.000
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	1	2.700.000
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.700.000</b>

#### B. Audit Kepatuhan

Dilaksanakan 12 audit dengan nilai kegiatan yang diawasi sebesar Rp12.176.511.424,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Rekapitulasi Audit Kepatuhan**  
**Semester I Tahun 2022**

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	38	42	1.566.088.181
1.01.01	Belanja dan/atau pengadaan barang/ jasa fiktif	1	1	323.000
1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang negara/ daerah	1	1	6.924.665



Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	5	6	15.683.000
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	4	8.600.000
1.03.01	Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	12	12	23.424.251
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	14	17	1.501.133.265
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	1	1	-
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	11	17	80.180.500
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	9	14	80.180.500
2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	4	-
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	2	-
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>	<b>59</b>	<b>1.636.268.681</b>

**Tabel 2. 3**  
**Daftar Obyek Pemeriksaan Audit**  
**Semester I Tahun 2022**

No	Audit 2022
1	Desa Sribit Kecamatan Delanggu
2	Desa Tugu Kecamatan Cawas
3	Desa Karangasem Kecamatan Cawas
4	Desa Bawukan Kecamatan Malang
5	Desa Dompnyongan Kecamatan Jogonalan
6	Desa Bogem Kecamatan Bayat
7	Desa Dompol Kecamatan Kemalang
8	Desa Tegalrejo Kecamatan Bayat
9	Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu
10	Desa Talang Kecamatan Bayat
11	Desa Burikan Kecamatan Cawas
12	Desa Baran Kecamatan Cawas



### **C. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu pada semester I tahun 2022 sebanyak 8 audit PKPT dan 6 non PKPT, antara lain sebagai berikut:

1. Audit Investigasi Desa Soka Kecamatan Karangdowo;
2. Audit Investigasi Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan;
3. Audit Investigasi Desa Kedung Ampel Kecamatan Cawas;
4. Audit Investigasi Desa Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan;
5. Audit Investigasi aduan Mal Administrasi di Dinas Pendidikan;
6. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Majegan Kecamatan Tulung;
7. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Klaten Utara Kecamatan Klaten Utara;
8. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Karanganom Kecamatan Karanganom;
9. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Klaten Utara Kecamatan Klaten Tengah;
10. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Dinas Kesehatan;
11. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 se-Kabupaten Klaten (kompilasi);
12. Perhitungan kerugian negara pada PD. BKK Wedi Cabang Karangnongko;
13. Perhitungan kerugian negara Desa Bendo Kecamatan Pedan;
14. Audit investigasi Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo;

### **D. Klarifikasi**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melakukan Klarifikasi pada 3 aduan PKPT dan 2 aduan non PKPT, antara lain sebagai berikut:

1. Klarifikasi aduan Desa Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan;
2. Klarifikasi aduan Pasar Srago Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah;
3. Klarifikasi aduan Desa Dengkeng Kecamatan Wedi;
4. Klarifikasi aduan Mal Administrasi di Dinas Pendidikan;
5. Klarifikasi aduan Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung.

## E. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi semester I tahun 2022 sebanyak 24 PKPT dan 1 non PKPT, antara lain:

1. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) pada 12 OPD Tahun 2021:

**Tabel 2. 4**  
**Daftar OPD Evaluasi MR Tahun 2021**

No	OPD
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Sekretariat DPRD
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Pendidikan
12	Inspektorat Daerah

2. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa triwulan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa triwulan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022;
5. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada 7 OPD:

**Tabel 2. 5**  
**Daftar OPD Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

NO	OPD	KATEGORI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2	Dinas Pendidikan	A
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
4	Dinas Kesehatan	BB
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BB
6	Kecamatan Klaten Selatan	B
7	Kecamatan Klaten Tengah	B



6. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 51 OPD, berikut 10 OPD dengan nilai tertinggi untuk diajukan penilaian kepada Kementerian PAN-RB:

**Tabel 2. 6**  
**Daftar OPD Evaluasi PMPRB Tahun 2022**

NO	OPD
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3	Dinas Kesehatan
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	Sekretariat Daerah
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Didapatkan hasil PMPRB Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar 80,61.

7. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 47 OPD dan UPT, berikut urutan berdasarkan ranking nilai tertinggi untuk diajukan penilaian ke Kementerian PAN-RB:

**Tabel 2. 7**  
**Daftar OPD dan UPT Evaluasi PMPZI Tahun 2022**

NO	OPD DAN UPT
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
3	Dinas Pendidikan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
5	Puskesmas Pemasang
6	Dinas Kesehatan
7	Puskesmas Karangnongko
8	Kecamatan Klaten Selatan
9	Puskesmas Jatinom
10	Puskesmas Majegan
11	Puskesmas Ngawen
12	Puskesmas Polanharjo
13	Puskesmas Klaten Selatan
14	Kecamatan Klaten Tengah
15	Puskesmas Ceper
16	Puskesmas Jambukulon
17	Puskesmas Kayumas
18	Puskesmas Cawas I



NO	OPD DAN UPT
19	Puskesmas Wonosari I
20	Puskesmas Klaten Tengah
21	Puskesmas Wedi
22	Puskesmas Cawas II
23	Puskesmas Klaten Utara
24	Puskesmas Johonalan II
25	Puskesmas Kalikotes
26	Puskesmas Karangdowo
27	Puskesmas Tulung
28	Puskesmas Juwiring
29	Puskesmas Prambanan
30	Puskesmas Manisrenggo
31	Puskesmas Wonosari II
32	Puskesmas Pedan
33	Puskesmas Gantiwarno
34	Puskesmas Jogonalan I
35	SMP N 3 Tulung
36	SMP N 5 Klaten
37	Puskesmas Bayat
38	SMP N 1 Jogonalan
39	Puskesmas Karanganom
40	Puskesmas Trucuk I
41	Puskesmas Trucuk II
42	Puskesmas Kebondalem
43	Kecamatan Klaten Utara
44	SMP N 2 Trucuk
45	Puskesmas Delanggu
46	SMP N 2 Delanggu
47	Puskesmas Kebonarum

## F. Reviu

Reviu yang telah dilaksanakan reviu 14 PKPT, antara lain sebagai berikut:

1. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III Tahun 2021 pada 7 OPD:
  - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
  - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. Dinas Kesehatan.

2. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2021;
5. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021;
6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;
7. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2023;
8. Reviu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan pada Kecamatan Juwiring TA 2021.

#### **G. Monitoring**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring 4 sesuai PKPT dan 16 non PKPT, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring pelaksanaan stock opname vaksin covid19 pada Dinas Kesehatan (instalasi farmasi);
2. Monitoring stok opname dan pemantauan TL hasil stok opname pada Puskesmas Jogonalan 1;
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Karangasem Kecamatan Cawas TA 2018;
4. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Jungkare Kecamatan Karangnom TA 2019;
5. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Ketitang Kecamatan Juwiring TA 2019;
6. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Pepe Kecamatan Ngawen TA 2019;
7. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Mundu Kecamatan Tulung TA 2019;
8. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring TA 2019;



9. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif Desa Soka Kecamatan Karangdowo TA 2019;
10. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Glodogan Kecamatan Klaten Selatan TA 2019;
11. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Blimbing Kecamatan Karangnongko TA 2020;
12. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo TA 2020;
13. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Bawukan Kecamatan Kemalang TA 2021;
14. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Dompok Kecamatan Kemalang TA 2021;
15. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Karangasem Kecamatan Cawas TA 2021;
16. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja Dinas Perhubungan TA 2021;
17. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Bogem Kecamatan Bayat TA 2021;
18. Monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2021 pada 241 wajib pajak, dengan total wajib pajak yang melapor sebanyak 224 wajib pajak;
19. Monitoring peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

#### **H. Pendampingan**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

1. Pendampingan pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada 241 wajib pajak;
2. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui alamat <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> kepada 51 OPD;
3. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada 47 OPD dan UPT;
4. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada 51 OPD;
5. Telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Kabupaten Sragen;



6. Perhitungan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan kas desa dan pengelolaan asset Tahun Anggaran 2019-2021 di Desa Bendo Kecamatan Pedan;
  7. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
  8. Narasumber pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Tulung.
- Kegiatan pada nomor 1-4 telah dilaksanakan, akan tetapi laporan pendampingan kegiatan tersebut belum tersedia.

#### I. Pengawasan lainnya

1. Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui aplikasi MCP (Korsupgah) yang dapat diakses melalui *jaga.id*.

Nilai Korsupgah KPK Kabupaten Klaten pada tahun 2021 adalah 81,44%, dan pada semester I tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh total nilai capaian 47,05%. Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap upaya peningkatan *progress* MCP Korsupgah tersebut di atas.

Sebagai koordinator Korsupgah, secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring untuk pemenuhan delapan area intervensi korsupgah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengelolaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

2. Pengendalian Gratifikasi

- a. Sosialisasi

Sosialisasi tentang gratifikasi di semester I tahun 2021. Berikut adalah upaya-upaya Sosialisasi gratifikasi yang telah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan:

- i. Surat Edaran Bupati

Sosialisasi Surat Edaran Bupati Klaten nomor 700/ 259/ 11 tanggal 28 April 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga secara masif dilakukan di berbagai group komunikasi WhatsApp.

ii. Sosialisasi Tatap Muka

Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi untuk Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten bertempat di SMP Muhammadiyah 1 Klaten pada 18-19 Mei 2022.

b. Penyelesaian Pelaporan Gratifikasi

Sampai dengan Semester I tahun 2022 terdapat 1 laporan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 8**  
**Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi**  
**UPG Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2022**

No	Tanggal Pelaporan	Status (Diteruskan KPK/Dikelola oleh UPG)	Taksiran Nilai (Rp)
1	08/03/2022	Tidak Wajib Dilaporkan	100.000
<b>Total</b>			<b>100.000</b>

c. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diundangkan di Klaten pada tanggal 9 April 2021 merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Penanganan Benturan Kepentingan.

Sebagai pedoman dan kerangka acuan bagi ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Sosialisasi mengenai benturan kepentingan telah dilaksanakan secara periodik. Penanganan benturan kepentingan merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai benturan kepentingan ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.



#### 4. *Wistleblowing system* (WBS)

Untuk memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Wistleblowing System*). Salah satu media pelaporan melalui *website* bisa diakses di <https://wbs.klaten.go.id/>

Sosialisasi mengenai WBS telah dilaksanakan secara periodik. WBS merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai WBS ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

#### 5. Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten nomor 700/033/11 tanggal 14 Januari 2022, per 28 Januari 2022 Pegawai Wajib Laporkan LHKPN Pemerintah Kabupaten Klaten yang telah melakukan pelaporan sebanyak 224 orang wajib pajak, dari 241 wajib pajak. Pelaporan dilakukan secara online pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

#### 6. Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pengisian LHKASN terus dipantau oleh Inspektorat Daerah, tercatat sampai dengan semester I tahun 2022 sebanyak 248 Pegawai Wajib LHKASN telah melakukan pelaporan. Pelaporan dilakukan secara online pada alamat <https://siharka.menpan.go.id/>.

#### 7. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah dan kemudian dilakukan *Quality Assurance*



(penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY.

SPIP direncanakan dalam PKPT tahun 2022, Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasikan dilakukan dengan aplikasi e-SPIP dari BPKP. Hingga semester I tahun 2022, telah terlaksana tahap pengisian oleh Admin Pemda, Asesor Pemda, dan Admin Asesor OPD, dan selanjutnya pada semester II tahun 2022 akan dilakukan penilaian mandiri oleh Asesor Pemda, dan Admin Asesor OPD.

#### 8. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan pada tahun 2018, berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 tanggal 26 Desember 2019, Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah berada pada level 3.

Pada semester I tahun 2022 telah dilakukan proses pemenuhan 6 elemen yakni elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, dan elemen peran dan layanan APIP, dan saat laporan ini dibuat, hasil nilai pemenuhan elemen kapabilitas APIP tersebut belum tersedia. Atas upaya-upaya yang telah dilakukan diharapkan dapat memperoleh capaian level 3 pada tahun 2022.

#### 9. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Kegiatan Saber Pungli dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 700/27 tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 300/316 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Klaten, melakukan berbagai upaya penindakan dan upaya operasi tangkap tangan.

### BAB III

#### HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

##### A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2021. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 360 temuan dan rekomendasi sebanyak 888 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester I tahun 2022 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 821 dari 888 rekomendasi ( 92,45%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 62 dari 888 rekomendasi (6,98%)
- c. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 5 dari 888 rekomendasi (0,57%)

##### B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP

Rincian atas status pemantauan tindak lanjut hasil Audit APIP disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah**  
**Tahun 2021**

NO	TAHUN	TINDAK LANJUT			
		REKOMENDASI	SESUAI	SALDO	%
1	2013	627	528	93	84,21
2	2014	396	353	2	89,14
3	2015	877	788	56	89,85
4	2016	1532	1432	87	93,47
5	2017	1104	1014	89	91,85
6	2018	1166	1100	60	94,34
7	2019	328	283	43	86,28
8	2020	306	280	26	91,50
9	2021	244	194	100	79,51
10	2022	60	14	46	23,33
<b>Jumlah</b>		<b>6884</b>	<b>6180</b>	<b>556</b>	<b>82,35</b>



## BAB IV

### SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Tahun 2022 adalah tahun perubahan dan pengharapan, baik dalam konteks kondisi di Kabupaten Klaten secara umum maupun dalam konteks pengawasan di Kabupaten Klaten. Pertama, tahun ini adalah tahun terbentuknya Inspektorat Pembantu Khusus, bersamaan dengan itu, tugas pokok dan fungsi di Inspektorat juga mengalami pergeseran dan perubahan. Kedua adalah kebijakan internal Inspektorat yang mulai memperbanyak kegiatan-kegiatan konsultasi. Adanya perubahan-perubahan ini mengharuskan terjadinya perubahan paradigma maupun perubahan perilaku. Tahun ini juga tahun penuh pengharapan setelah dua tahun terakhir Indonesia dilanda pandemi Covid 19, tahun ini aktivitas masyarakat mulai berangsur normal dan penuh harapan.

Dampak atas dua hal di atas sudah coba diantisipasi dan terencana dalam PKPT tahun 2022, namun demikian dalam pelaksanaannya sampai dengan Semester I 2022 ini, masih banyak kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas konsultasi terutama di Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus). Hal ini cukup wajar mengingat sebagian tugas konsultasi yang saat ini dilaksanakan oleh Irbansus sebelumnya dilaksanakan Sekretariat, selain itu, seluruh penyelesaian pengaduan masyarakat dan asuransi yang bersifat khusus dilaksanakan seluruhnya oleh Irbansus. Hal-hal baru ini terus dilakukan evaluasi dan perbaikan.

#### B. Hambatan:

##### 1. Hambatan Internal :

- a. Tambahan-tambahan penugasan yang tidak terencana dalam PKPT terlalu banyak dibandingkan sumber daya yang dimiliki.
- b. Terbatasnya jumlah fungsional auditor dibandingkan jumlah klien.
- c. Masih kurangnya kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
- d. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan.



- e. Terdapat perubahan kedudukan susunan organisasi dan tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021.
- f. Perubahan porsi penugasan yang lebih memperbanyak peran konsultasi

2. Hambatan Eksternal :

- a. Belum semua pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan, terutama pengelola keuangan desa.
- b. Sangat luasnya wilayah kerja Inspektorat Daerah sehingga tidak semua obyek Audit dapat terjangkau pada setiap tahunnya.
- c. Belum optimalnya pengendalian intern di hampir semua auditan.
- d. Hasil revidu perencanaan dan penganggaran hanya dipakai secara formalitas, karena prosesnya dilaksanakan setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai.

**C. Saran :**

- 1. Untuk menambah kuantitas dan kompetensi para pejabat fungsional auditor dan P2UPD yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten perlu adanya peningkatan kemampuan baik melalui Bimtek, PKS maupun pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat baik Diklat Fungsional yang tidak sebanding dengan jumlah auditor, maka PKPT harus fokus dan berbasis risiko
- 2. Perlu adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk terus memperbaiki sistem pengendalian intern
- 3. Optimalisasi dukungan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas pengawasan seperti penggunaan aplikasi simwas daring (online) yang terintegrasi
- 4. Memperkuat dan memperbanyak aktivitas konsultasi dan aktivitas antikorupsi sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.
- 5. Proses perencanaan dan penganggaran agar terjadwal sesuai dengan ketentuan.

6. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta penugasan yang lebih memperbanyak peran konsultasi, perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penugasan berorientasi hasil.

Klaten, 9 Agustus 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**



**JAJANG PRIONO, S.STP.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19810216 199912 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
INSPEKTORAT DAERAH**



---

**IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN  
SEMESTER II T.A. 2021**

---

Nomor : 700/ 084.1/11

Tanggal : 09 Februari 2022



## **KATA PENGANTAR**

Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2021 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan ini menggambarkan kegiatan dan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan selama Semester II Tahun Anggaran 2021 mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit dan penyelesaian temuan pengawasan/tindaklanjut temuan hasil Audit.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar dalam pelaksanaan pengawasan lebih optimal, terpadu dan sinergi sehingga didapatkan hasil pengawasan/mekanisme kontrol yang maksimal.

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2021 ini tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, oleh karena itu upaya perbaikan akan terus kami laksanakan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**RINGKASAN UNTUK PIMPINAN**  
**LAPORAN PENGAWASAN APIP INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN**  
**PADA SEMESTER II T.A. 2021**

Menurut Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anticorruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam rangka melaksanakan peran-peran di atas Inspektorat Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan pengawasan selama Semester II Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Audit Berkala.

Rencana audit berkala di Semester II tahun 2021 ini sebanyak 38 objek audit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Audit Dana Desa sebanyak 30 Desa, dan
- b. Audit Dana BOS sebanyak 8 Sekolah.

Sampai dengan Semester II tahun 2021 ini telah dilaksanakan 30 audit dana desa dengan nilai kegiatan yang diawasi sebesar Rp44.863.205.457,00, dan 8 audit dana BOS dengan nilai kegiatan yang diawasi sebesar Rp6.569.231.359,00.

Dari 38 audit tersebut terdapat 231 rekomendasi, sedangkan temuan dominan berupa temuan ketidakpatuhan berupa administrasi, kekurangan penerimaan daerah, dan kerugian daerah.

## 2. Audit dengan Tujuan Tertentu.

Terdapat 4 audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan PKPT 2021, yakni:

1. Audit pelaksanaan vaksinasi dan penanggulangan Pandemi Covid 19 di Puskesmas-Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
2. Audit tujuan tertentu belanja dana desa TA 2021 pada Desa Blimbing, Desa Plawikan, Desa Pepe, Desa Daleman;
3. Audit tujuan tertentu terhadap kepatuhan pelayanan perijinan dan non perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Probity audit pada pengadaan barang jasa di Dinas Pendidikan.

Terdapat pula Audit dengan tujuan tertentu diluar PKPT, antara lain *Probity Audit* atas serah terima paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Jambukulon (APBD) TA 2021, *Probity audit* pekerjaan pembangunan kantor BPBD untuk serah terima pekerjaan pada Disperwaskim, *Probity audit* atas pelaksanaan kontrak paket pekerjaan mall pelayanan public (APBD) TA 2021, dan *Probity audit* pelaksanaan kontrak paket pekerjaan pembangunan taman kuliner (APBD). Probity Audit PBJ merupakan Audit Tujuan Tertentu (vide penjelasan Pasal 4 (4) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) untuk menilai Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ.

Selain itu juga telah dilaksanakan audit dengan tujuan tertentu diluar PKPT 2021 atas permintaan dari APH dan aduan masyarakat.

## 3. Evaluasi

Semester II tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi, antara lain:

- a. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dilaksanakan pada 51 OPD.
- b. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) terhadap 3 OPD yakni Rumah Sakit Daerah Bagas Waras, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 51 OPD dengan hasil 2 OPD



Nilai SAKIP kategori A, 19 OPD dengan kategori BB, 14 OPD dengan kategori B, 14 OPD dengan kategori CC, sisanya sebanyak 2 OPD dengan kategori C.

- d. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Evaluasi Benturan Kepentingan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### 4. Pendampingan/Asistensi

- a. Asistensi pendampingan verifikasi atas ajuan kekurangan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 bulan Desember 2020.
- b. Asistensi pada perubahan RKA BOK Kabupaten dan Puskesmas.
- c. Sosialisasi dan bimbingan teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP melalui aplikasi SPIP terintegrasi <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> kepada 51 OPD.
- d. Asistensi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
- e. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada 3 unit kerja. (DPMPTSP, Disdukcapil, dan RSD Bagas Waras).

#### 5. Reviu.

Reviu yang telah dilaksanakan hingga Semester II Tahun Anggaran 2021 yaitu:

- a. Reviu RKPD tahun 2022,
- b. Reviu LKjIP Kabupaten Klaten tahun 2020,
- c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2020,
- d. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) T.A. 2021,
- e. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik,
- f. Reviu Laporan Keuangan BLUD Tahun Anggaran 2020 (32 Puskesmas dan 1 RSD Bagas Waras),
- g. Reviu RPJMD tahun 2021-2026,
- h. Reviu RKPD P T.A. 2021
- i. Reviu KUA PPAS P T.A. 2021
- j. Reviu KUA PPAS T.A. 2022
- k. Reviu Renstra T.A. 2021-2026

- l. Reviu RKA P T.A 2021
- m. Reviu RKA T.A 2022
- n. Reviu atas Rotasi, Mutasi dan Promosi Pegawai pada BKPPD.
- o. Reviu Kinerja UKPBJ Tahun 2021
- p. Reviu SSH
- q. Reviu HSPK

6. Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2020. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 357 temuan dan rekomendasi sebanyak 883 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan Semester II Tahun 2021 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 803 dari 883 rekomendasi ( 90,94%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 80 dari 883 rekomendasi (9,06%)

Rekapitulasi pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 terlampir.

7. Tindaklanjut Hasil Audit Inspektorat

Pada Semester II Tahun 2021 tindak lanjut temuan Inspektorat dilakukan pada 179 rekomendasi dari 231 rekomendasi, pada 38 objek pemeriksaan.

8. Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat

Hingga Semester II Tahun 2021 terdapat 18 (delapan belas) aduan, dan 18 aduan tersebut dinyatakan telah selesai tindak lanjut.

9. Kegiatan Pengawasan lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya berupa:

- a. Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MCP Korsupgah);
- b. Pengendalian Gratifikasi;

- c. Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. *Whistleblowing system*;
- e. Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- f. Peningkatan Maturitas SPIP;
- g. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- h. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Demikian ringkasan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Klaten, 09 Februari 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**



**JAJANG PRIHONO, S.STP.**

Klaten Pembina Tingkat I

NIP. 19810216 199912 1 001

Tembusan. disampaikan kepada Yth:  
Menteri PAN dan RB RI di Jakarta.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I INFORMASI UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II HASIL PENGAWASAN .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>22</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan .....	2
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Kelompok Temuan Audit Berkala.....	3
Tabel 2. 2 Daftar Obyek Pemeriksaan Audit .....	4
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Nilai Evaluasi SAKIP.....	6
Tabel 2. 4 Capaian MCP Korsupgah Kabupaten Klaten.....	9
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi UPG Kabupaten Klaten ..	11
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat.....	16
Tabel 4. 1 Daftar Pengaduan Masyarakat .....	17

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.....	23
Lampiran 2 Daftar Laporan Hasil Audit Reguler Tahun 2021 .....	24
Lampiran 3 Daftar Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021 ..	26
Lampiran 4 Daftar Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021 .....	31
Lampiran 5 Daftar Laporan Hasil Pendampingan/ Asistensi Tahun 2021 .....	34
Lampiran 6 Daftar Laporan Hasil Reviu Tahun 2021 .....	37



# **BAB I**

## **INFORMASI UMUM**

### **A. Dasar Hukum**

Inspektorat Kabupaten Klaten dibentuk dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten.

### **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Inspektur kemudian berturut turut di bawahnya adalah:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi
  - (1) Ka. Sub Bag Umum, Kepegawanan dan Keuangan
  - (2) Ka. Sub Bag Perencanaan Program
  - (3) Ka. Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan
2. Inspektur Pembantu Wilayah I
3. Inspektur Pembantu Wilayah II
4. Inspektur Pembantu Wilayah III
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan**

Laporan Ikhtisar Hasil Pelaporan ini disusun dalam rangka penyajian data kepada pemimpin organisasi (Bupati) untuk bahan evaluasi dan bahan pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah daerah yang akan ditetapkan pada tahun-tahun selanjutnya.

### **D. Program Pengawasan dan Realisasinya**

Program pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Klaten sebagaimana dituangkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat

Kabupaten Klaten T.A. 2021 dengan program kerja dan realisasi sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan**  
**Tahun 2021**

No	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan	PKPT		NON PKPT	
		Target (OP)	Realisasi (OP)	Target (OP)	Realisasi (OP)
1.	Audit				
	- Audit Berkala	38	38	-	-
	- Audit Dengan Tujuan Tertentu	9	4	-	46
2.	Evaluasi	-	2	-	1
3.	Reviu	15	17	-	-
4.	Pendampingan/ Asistensi	-	-	-	1
5.	Pengaduan Masyarakat	-	-	-	18
6.	Pemantauan Tindak Lanjut	64	4	-	1
7.	Kegiatan Pengawasan lainnya	-	-	-	-

#### **E. SUMBER DAYA**

Gambaran sumber daya yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebesar Rp18.663.941.845,00.
- b. APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebesar Rp2.949.643.677.710,28.
- c. Jumlah pegawai sebanyak 53 orang yang terdiri dari
  - 31 orang auditor
  - 5 orang P2UPD
  - 8 orang pejabat struktural
  - 6 orang pelaksana
  - 2 orang pranata Komputer
  - 1 orang arsiparis
- d. Jumlah objek pengawasan terdiri dari :
  - SKPD sebanyak 51
  - Desa sebanyak 391
  - Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1
  - Puskesmas sebanyak 34
  - Sekolah Dasar sebanyak 704
  - Sekolah Menengah Pertama sebanyak 65
  - BUMD sebanyak 5

## BAB II HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Klaten tahun 2021 didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non PKPT. Hasil Kegiatan pengawasan meliputi :

### A. Audit

#### 1. Audit Berkala

Telah dilaksanakan 38 audit dengan nilai kegiatan yang diawasi sebesar Rp51.432.436.816,00. Total temuan sebanyak 154 dengan nilai temuan Rp320.669.313,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Kelompok Temuan Audit Berkala**  
**Tahun 2021**

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jml	%	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	5
	<b>Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan</b>	1.00.00			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	30	19,48	140.958.933
2	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	33	21,43	164.560.531
3	Administrasi	1.04.00	43	27,92	15.115.249
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>106</b>	<b>68,83</b>	<b>320.634.713</b>
	<b>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	30	19,48	34.600
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	7	4,55	-
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	10	6,49	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>47</b>	<b>30,52</b>	<b>34.600</b>
	<b>Temuan 3 E</b>	3.00.00			
1	Ketidakefektifan	3.03.00	1	0,65	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>1</b>	<b>0,65</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Kejadian</b>		<b>154</b>	<b>100</b>	<b>320.669.313</b>



**Tabel 2. 2**  
**Daftar Obyek Pemeriksaan Audit**  
**Tahun 2021**

No	Audit 2021	No	Audit 2021
1	Dana BOS SMP N 4 Klaten	20	Dana Desa Juwiring, Juwiring
2	Dana BOS SMP N 1 Kebonarum	21	Dana Desa Nengahan, Bayat
3	Dana BOS SMP N 2 Klaten	22	Dana Desa Srebegan, Ceper
4	Dana BOS SMP N 3 Cawas	23	Dana Desa Canan, Wedi
5	Dana BOS SMP N 1 Wedi	24	Dana Desa Taji, Juwiring
6	Dana BOS SMP N 1 Juwiring	25	Dana Desa Kenaiban, Juwiring
7	Dana BOS SMP N 1 Karanganyam	26	Dana Desa Jarum, Bayat
8	Dana BOS SMP N 1 Kalikotes	27	Dana Desa Krakitan, Bayat
9	Dana Desa Bulurejo, Juwiring	28	Dana Desa Planggu, Trucuk
10	Dana Desa Pasungan, Ceper	29	Dana Desa Jebugan, Klaten Utara
11	Dana Desa Ngawonggo, Ceper	30	Dana Desa Basin, Kebonarum
12	Dana Desa Sapen, Manisrenggo	31	Dana Desa Sidoharjo, Polanharjo
13	Dana Desa Kebondalem Lor, Prambanan	32	Dana Desa Demangan, Karangdowo
14	Dana Desa Bugisan, Prambanan	33	Dana Desa Gemblegan, Kalikotes
15	Dana Desa Jaten, Juwiring	34	Dana Desa Wangen, Polanharjo
16	Dana Desa Leses, Manisrenggo	35	Dana Desa Gadungan, Wedi
17	Dana Desa Karanganyam, Klaten Utara	36	Dana Desa Tambongwetan, Kalikotes
18	Dana Desa Banyuripan, Bayat	37	Dana Desa Kapungan, Polanharjo
19	Dana Desa Pereng, Prambanan	38	Dana Desa Gedongjetis, Tulung

Jumlah laporan atas hasil audit yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 38 laporan, dengan daftar laporan terlampir.

## 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Terdapat 4 audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan PKPT 2021, yakni:

- a. Audit pelaksanaan vaksinasi dan penanggulangan Pandemi Covid 19 di Puskesmas-Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- b. Audit tujuan tertentu belanja dana desa TA 2021 pada Desa Blimbing, Desa Plawikan, Desa Pepe, Desa Daleman;
- c. Audit tujuan tertentu terhadap kepatuhan pelayanan perijinan dan non perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Probitas audit pada pengadaan barang jasa di Dinas Pendidikan.

Terdapat pula Audit dengan tujuan tertentu diluar PKPT, antara lain *Probity Audit* atas serah terima paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Jambukulon (APBD) TA 2021, *Probity audit* pekerjaan pembangunan kantor BPBD untuk serah terima pekerjaan pada Disperwaskim, *Probity audit* atas pelaksanaa kontrak paket pekerjaan mall pelayanan public (APBD) TA 2021, dan *Probity audit* pelaksanaan kontrak paket pekerjaan pembangunan taman kuliner (APBD). Probity Audit PBJ merupakan Audit Tujuan Tertentu (vide penjelasan Pasal 4 (4) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) untuk menilai Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ.

Selain itu juga telah dilaksanakan audit dengan tujuan tertentu diluar PKPT 2021 atas permintaan dari APH dan aduan masyarakat.

Jumlah laporan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 92 laporan, dengan daftar laporan terlampir.

## **B. Evaluasi**

Hingga semester II tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi, antara lain:

1. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) atas 51 OPD karena perubahan jadwal di Kementerian Pertahanan RI, yang semula dijadwalkan pada bulan Juli menjadi bulan Juni.
2. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) terhadap 3 OPD yakni Rumah Sakit Daerah Bagas Waras, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 51 OPD dengan hasil 2 OPD Nilai SAKIP kategori A, 19 OPD dengan kategori BB, 14 OPD dengan kategori B, 14 OPD dengan kategori CC, sisanya sebanyak 2 OPD dengan kategori C, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 3**  
**Rekapitulasi Nilai Evaluasi SAKIP**  
**Tahun 2021**

NO	OPD	NILAI	KATEGORI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,81	A
2	Dinas Arsip dan Perpustakaan	83,11	A
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,05	BB
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	78,97	BB
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,74	BB
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	78,02	BB
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	77,74	BB
8	Dinas Pendidikan	77,73	BB
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	77,35	BB
10	Dinas Perhubungan	77,19	BB
11	Dinas Kesehatan	77,18	BB
12	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	76,57	BB
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	76,44	BB
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75,43	BB
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75,28	BB
16	Inspektorat	73,88	BB
17	Sekretariat Daerah	73,82	BB
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72,5	BB
19	Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm	71,71	BB
20	Sekretariat DPRD	71,25	BB
21	Kecamatan Wedi	70,04	BB
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	69,03	B
23	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	68,91	B
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	68,74	B
25	Kecamatan Karangdowo	68,53	B
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64,66	B
27	Kecamatan Kemalang	64,3	B
28	Satuan Polisi Pamong Praja	63,79	B
29	Kecamatan Tulung	63,31	B
30	Kecamatan Gantiwarno	63,19	B
31	Kecamatan Prambanan	62,97	B
32	Kecamatan Klaten Selatan	60,71	B
33	Kecamatan Karangnongko	60,59	B
34	Kecamatan Jogonalan	60,16	B
35	Kecamatan Polanharjo	60,09	B
36	Kecamatan Kebonarum	59,85	CC
37	Kecamatan Pedan	59,62	CC
38	Kecamatan Ngawen	59,17	CC
39	Kecamatan Klaten Utara	58,98	CC
40	Kecamatan Wonosari	58,93	CC
41	Kecamatan Cawas	58,75	CC



NO	OPD	NILAI	KATEGORI
42	Kecamatan Karanganyam	58,49	CC
43	Kecamatan Juwiring	58,39	CC
44	Kecamatan Klaten Tengah	56,32	CC
45	Kecamatan Bayat	56,25	CC
46	Kecamatan Manisrenggo	56,05	CC
47	Kecamatan Kalikotes	54,72	CC
48	Kecamatan Trucuk	54,47	CC
49	Kecamatan Jatinom	51,76	CC
50	Kecamatan Ceper	43,76	C
51	Kecamatan Delanggu	42,45	C

4. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Evaluasi Benturan Kepentingan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jumlah laporan atas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 56 laporan, dengan daftar laporan terlampir.

### C. Reviu

Reviu yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. Reviu RKPD tahun 2022;
2. Reviu LKjIP Kabupaten Klaten tahun 2020;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2020;
4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) T.A. 2021;
5. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik;
6. Reviu Laporan Keuangan BLUD Tahun Anggaran 2020 (32 Puskesmas dan 1 RSD Bagas Waras);
7. Reviu RPJMD tahun 2021-2026;
8. Reviu RKPD P T.A. 2021;
9. Reviu KUA PPAS P T.A. 2021;
10. Reviu KUA PPAS T.A. 2022;
11. Reviu Renstra T.A. 2021-2026;
12. Reviu RKA P T.A 2021;
13. Reviu RKA T.A 2022;
14. Reviu atas Rotasi, Mutasi dan Promosi Pegawai pada BKPPD;

15. Reviu Kinerja UKPBJ Tahun 2021;
16. Reviu SSH;
17. Reviu HSPK.

Jumlah laporan atas hasil reviu yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 376 laporan, dengan daftar laporan terlampir.

#### **D. Pendampingan/ Asistensi**

1. Asistensi pendampingan verifikasi atas ajuan kekurangan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 bulan Desember 2020;
2. Asistensi pada perubahan RKA BOK Kabupaten dan Puskesmas;
3. Sosialisasi dan bimbingan teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP melalui aplikasi SPIP terintegrasi <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> kepada 51 OPD;
4. Asistensi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
5. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada 3 unit kerja. (DPMPTSP, Disdukcapil, dan RSD Bagas Waras).

Jumlah laporan atas hasil pendampingan/ asistensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 52 laporan, dengan daftar laporan terlampir.

#### **E. Kegiatan Pengawasan lainnya**

1. Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui aplikasi MCP (Korsupgah) yang dapat diakses melalui *jaga.id*.

Nilai Korsupgah KPK Kabupaten Klaten pada tahun 2021 mencapai 81,44%. Inspektorat Kabupaten Klaten telah melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap 9 OPD/unit untuk mengupayakan peningkatan *progress* MCP Korsupgah tersebut di atas.

Sebagai koordinator Korsupgah, secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring untuk pemenuhan delapan area intervensi korsupgah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengelolaan Barang dan Jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

**Tabel 2. 4**  
**Capaian MCP Korusupgah Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2021**

No	Area Intervensi	% Bobot	% Capaian	Indikator	% Bobot	% Nilai Verifikasi
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	17	78.9	a. Standar Satuan Harga (SSH)	24	100
				b. Analisis Standar Biaya (ASB)	21	50
				c. Penganggaran APBD	25	68
				d. Pengawasan	30	91.25
2	Pengadaan Barang dan Jasa	19	82.54	a. SDM UKPBJ	20	69.4
				b. Pelaksanaan Tupoksi	20	79.3
				c. Perangkat Pendukung	15	100
				d. Penayangan SIRUP	21	100
				e. Pengendalian dan Pengawasan	24	70
3	Perizinan	10	73.77	a. Regulasi	26	82
				b. Infrastruktur	17	91.2
				c. Proses Perizinan	26	71.5
				d. Pengendalian dan Pengawasan	31	59.2
4	Pengawasan APIP	14	84.48	a. Kapabilitas APIP	23	63.43
				b. Saluran Pengaduan Masyarakat	16	100
				c. Probitiy Audit	24	80
				d. Pemeriksaan Khusus	16	100
				e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	21	89
5	Manajemen ASN	10	91.19	a. Regulasi	17	85.3
				b. Sistem Informasi	17	100
				c. Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	22	100
				d. Tata Kelola ASN	21	94.25
				e. Pengawasan	23	77.8
6	Optimalisasi Pajak Daerah	11	75.97	a. Database Pajak	30	82.25
				b. Inovasi Peningkatan Pajak	26	100
				c. Penagihan Tunggakan Pajak	22	15
				d. Peningkatan Pajak	22	100
7	Manajemen Aset Daerah	11	69.68	a. Database Aset	24	100
				b. Pengelolaan Aset	22	42
				c. Sertifikasi Aset	29	61
				d. Penertiban Aset	25	75
8	Tata Kelola Keuangan Desa	8	100	a. Publikasi	23	100
				b. Regulasi	32	100
				c. Pengawasan	45	100



## 2. Pengendalian Gratifikasi

### a. Sosialisasi

Sosialisasi tentang gratifikasi di semester I tahun 2021. Berikut adalah upaya-upaya Sosialisasi gratifikasi yang telah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan:

#### i. Surat Edaran Bupati

Sosialisasi Surat Edaran Bupati 700/284/11 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga secara masif dilakukan di berbagai group komunikasi WhatsApp.

#### ii. Sosialisasi Tatap Muka

Sosialisasi gratifikasi melalui tatap muka dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan, antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi gratifikasi untuk para bidan di lingkungan Dinas Kesehatan pada 2 Juni 2021 di Gedung IBI klaten, dihadiri 20 orang peserta.
2. Sosialisasi gratifikasi untuk para guru di lingkungan Dinas Pendidikan pada 8-9 Juni 2021 di Gedung PGRI Klaten, dihadiri total 104 orang peserta dalam 2 hari tersebut.
3. Sosialisasi gratifikasi untuk para bidan di lingkungan Dinas Kesehatan pada 12 Oktober 2021 di Gedung IBI klaten, dihadiri 25 orang peserta.

b. Penyelesaian Pelaporan Gratifikasi

Sampai dengan Semester II tahun 2021 terdapat 11 laporan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi**  
**UPG Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2021**

No .	Tanggal Pelaporan	Penerimaan/ Penolakan	Taksiran Nilai (Rp)	Status (Diteruskan KPK/Dikelola oleh UPG)
1	14/12/2021	Penolakan	0	Catat dan tidak perlu diproses
2	16/06/2021	Penerimaan	1.000.000	Diproses KPK
3	10/05/2021	Penolakan	50.000	Catat dan tidak perlu diproses
4	06/05/2021	Penerimaan	50.000	Diproses Instansi-Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan
5	16/04/2021	Penerimaan	150.000	Diproses KPK
6	16/04/2021	Penerimaan	100.000	Diproses Instansi-Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan
7	16/04/2021	Penerimaan	150.000	Diproses KPK
8	16/04/2021	Penerimaan	100.000	Diproses Instansi-Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan
9	16/04/2021	Penerimaan	150.000	Diproses KPK
10	16/04/2021	Penerimaan	100.000	Diproses Instansi-Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan
11	26/02/2021	Penerimaan	150.000	Diproses KPK
12	24/02/2021	Penerimaan	100.000	Diproses Instansi-Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan
<b>Total</b>			<b>2.100.000</b>	

### c. Evaluasi Kebijakan Gratifikasi

Dalam rangka terus menyesuaikan dengan kebutuhan praktik pengendalian gratifikasi dan penyesuaian peraturan terkait lainnya, Inspektorat telah melakukan evaluasi atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Hasil evaluasi menyatakan bahwa Peraturan bupati tentang gratifikasi harus segera diubah/diperbaiki, sehingga terbit Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diundangkan di Klaten pada tanggal 9 April 2021. Beberapa alasan yang menyebabkan Peraturan Bupati tentang gratifikasi harus direvisi adalah:

- 1) Subjek penerima gratifikasi yang diatur hanya sebatas **pejabat/pegawai**, Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 12 B UU Nomor 20/2001 bahwa subjek penerima gratifikasi sangatlah luas yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara;
- 2) Pasal yang membahas tentang daftar penerimaan/penolakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, tidak sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- 3) Jangka waktu pelaporan gratifikasi ke Unit Pengendali Gratifikasi tidak sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- 4) Pasal 12 mengatur tentang perlindungan terhadap saksi pelapor. Pasal ini tidak relevan dalam pelaporan gratifikasi, selain itu, hak-hak saksi seperti pemberian tempat kediaman baru dan pemberian kebutuhan hidup sementara, di luar kemampuan dan kewenangan pemda.
- 5) UPG tidak diatur supaya keanggotaan dan kedudukannya berada di unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan atau pengawasan. Sehingga pada praktiknya SK Bupati tentang UPG saat ini masih terdiri dari berbagai Kepala perangkat daerah yang fungsinya bukan sebagai pengawas. Praktiknya, UPG dengan susunan keanggotaan saat ini sangat tidak efektif dan efisien.

3. Penanganan Benturan Kepentingan.

Sebagai pedoman dan kerangka acuan bagi ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Sosialisasi mengenai benturan kepentingan telah dilaksanakan secara periodik. Penanganan benturan kepentingan merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai benturan kepentingan ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

4. *Wistleblowing system* (WBS)

Untuk memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Wistleblowing system*). Salah satu media pelaporan melalui *website* bisa diakses di *wbs.klatenkab.go.id*

Sosialisasi mengenai WBS telah dilaksanakan secara periodik. WBS merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai WBS ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

5. Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pengisian LHKASN dilaksanakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum ditetapkan sebagai wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pengisian LHKASN terus dipantau oleh Inspektorat, fokus tahun ini terutama untuk perangkat daerah atau unit yang diajukan dalam pembangunan zona integritas. Sampai dengan Semester II tahun 2021, telah terdapat 1.347 ASN yang melakukan pelaporan.



6. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15. Kabupaten Klaten kemudian dinyatakan telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP berdasarkan hasil penjaminan mutu BPKP Pusat tanggal 26 November 2019

SPIP direncanakan dalam PKPT tahun 2021, dan akan dilaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasikan dengan aplikasi e-SPIP sari BPKP.

7. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali pada tahun 2018. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga), namun demikian hasil evaluasi (*quality Assurance*) dari BPKP Pusat menunjukkan baru menjangkau level 2+.

Untuk meningkatkan Kapabilitas APIP menjadi level 3, Inspektorat Kabupaten Klaten telah mengajukan kembali permintaan QA kepada BPKP dengan memperbaiki dua elemen yang masih kurang. Inspektorat Kabupaten Klaten kemudian melakukan perbaikan atas dua elemen yang

masih kurang (Elemen 2: Manajemen Sumber Daya Manusia; Elemen 3: Praktik Profesional) dan kemudian melakukan penilaian mandiri lagi pada tahun 2019. Penilaian mandiri tersebut kemudian diajukan ke BPKP DIY untuk diajukan QA, selanjutnya oleh BPKP DIY hasil QA tersebut diajukan ke BPKP Pusat untuk dilakukan reuiu. Akhirnya, berdasarkan Laporan Hasil Reuiu (LHR) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 tanggal 26 Desember 2019, Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten telah berada pada level 3.

8. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Kegiatan Saber Pungli dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 700/27 tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 300/316 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Klaten. melakukan berbagai upaya penindakan dan operasi tangkap tangan.

**BAB III**  
**HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT**

**A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2020. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 357 temuan dan rekomendasi sebanyak 883 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan Semester II Tahun 2021 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 803 dari 883 rekomendasi ( 90,94%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 80 dari 883 rekomendasi (9,06%)

**B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP**

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit berkala untuk rekomendasi temuan mulai tahun 2009 sebanyak 8.487 rekomendasi, dan telah diselesaikan tindak lanjutnya sebanyak 7.584 rekomendasi atau 88,49%. Rincian atas status pemantauan tindak lanjut hasil Audit APIP disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat**  
**Tahun 2021**

NO	TAHUN	TINDAK LANJUT			
		REKOMENDASI	SESUAI	SALDO	%
1	2009	485	444	40	91,55
2	2010	178	163	11	91,57
3	2011	455	452	3	99,34
4	2012	811	582	222	71,76
5	2013	627	528	93	84,21
6	2014	396	353	2	89,14
7	2015	877	788	56	89,85
8	2016	1532	1432	87	93,47
9	2017	1104	1014	89	91,85
10	2018	1166	1100	60	94,34
11	2019	328	283	43	86,28
12	2020	297	266	31	89,56
13	2021	231	179	52	77,49
<b>Jumlah</b>		<b>8487</b>	<b>7584</b>	<b>789</b>	<b>88,49</b>

## BAB IV

### HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebanyak 18 (sebelas) aduan dan seluruh aduan tersebut telah selesai dilakukan tindak lanjutnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Daftar Pengaduan Masyarakat**  
**Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL MASUK</b>	<b>MEDIA ADUAN</b>	<b>MATERI ADUAN</b>
1	15/02/2021	Surat GNPk RI No: 08/GNPk-RI Klt/11/2021 Tanggal 15 Februari 2021	Penanganan kasus PTSL Ds Jomboran Klaten tengah
2	16/02/2021	Surat Forum LSM Klaten	Dugaan penyimpangan dana desa di Ds. Puluhan Kec. Trucuk
3	15/03/2021	Surat Aduan Hartatiatik (Jaga.Id) Tanggal 11 Februari 2021	Pengajuan bantuan UMKM
4	15/03/2021	Surat Aduan Adi Wiseno (Jaga.Id) Tanggal 11 Februari 2021	Aduan data di kementerian sosial menerima bantuan sosial tetapi di lapangan tdk menerima (Desa Ngolodono Kec Karangdowo)
5	05/04/2021	Kantor Hukum "Adil" Pengaduan 010/S-LP/ADIL/III/2021 tgl 30 Maret 2021	Aduan Sdr. Sardi, pemilik toko bangan Rebin Jaya terhadap Sdr Nomy Yanuardo (Kades Bendo Kecamatan Pedan)
6	07/06/2021	Surat Drs. Ma'ruf Iranto, SH Tanggal 2 Juni 2021	Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara yang dilakukan oleh perangkat desa (Kades Kelurahan Baran cawas)
7	15/07/2021	Email-Komite Sekolah TK dan SD	Dugaan adanya pungutan liar sekolah di Wilayah Kabupaten Klaten
8	03/08/2021	GNPK-RI Balasan Surat terkait limbah dari kejaksaan (PTSI Jomboran)	Atas surat GNPk-RI telah ditanggapi oleh inspektorat dengan Nomor : 700/364/11 tanggal 5 Agustus 2021 hal jawaban surat 017/GNPk- RI/Klt/VII/2021, menanggapi



<b>NO</b>	<b>TANGGAL MASUK</b>	<b>MEDIA ADUAN</b>	<b>MATERI ADUAN</b>
			permintaan data terkait kasus PTSL Jomboran ditolak sesuai SK PPID Nomor 002/PPID-P/11 tanggal 5 Agustus 2021
9	31/08/2021	Surat Diskominfo No: 045.2/492/21 Tanggal 31 Agustus 2021 Laporan masyarakat Melalui Lapor Gub a.n. Danang Pamungkas	Aduan masyarakat dugaan potongan bantuan PKH di Desa Tumpukan Kec Karangdowo
10	24/09/2021	Surat Diskominfo No: 045.2/544/21 tgl Perihal Laporan masyarakat melalui kanal Lapor Gub a.n. Edi Kusmanto	Klarifikasi atas Laporan masyarakat melalui kanal Lapor Gub (Bendo Kec Pedan)
11	04/10/2021	Surat Aduan Perwakilan Masyarakat Desa Pepe Kec. Ngawen (Sdr. Samsuri)	Dugaan penyelewengan keuangan Desa Pepe Kec Ngawen TA 2020
12	01/02/2021	Surat Polres Klaten No: B/50/1/RES.3.3/2021/Reskrim Tanggal 14 Januari 2021	Pelimpahan perkara Pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi Dana hasil lelang bekas gedung SD N Lemahireng Kec Pedan
13	01/02/2021	Surat Polres Klaten No: B/51/1/RES.3.3/2021/Reskrim Tanggal 14 Januari 2021	Pelimpahan perkara Pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan kab 2019 Ds Gondangsari, Kec Juwiring
14	04/02/2021	Surat Kejaksaan Negeri Klaten No: R- 509/M.3.19/Fd.1/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020	Pelimpahan laporan dugaan penyimpangan dalam anggran pendapatan dan belanja Desa Jarum pada Kegiatan Pembangunan jembatan dengan nilai anggran Rp 1.980.000.000,-
15	29/03/2021	Surat Kemensetneg RI No: B-78/Kemensetneg/D- 2/Dumas/DM.00/08/2020 Tanggal 28 Agustus 2020	Klarifikasi atas aduan Sri Peristiwainingsih perihal permohonan bantuan dana

<b>NO</b>	<b>TANGGAL MASUK</b>	<b>MEDIA ADUAN</b>	<b>MATERI ADUAN</b>
16	05/07/2021	POLDA JATENG No: B/6384/VI/RES.3.3/2021/ Reskrimsus Tanggal 30 Juni 2021	Limpahan perkara POLDA Jawa Tengah atas dugaan Tindak pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan Kab Klaten Terkait Pengadaan Gamelan TA 2019 dan 2020, Bantuan DAK Bidang Pendidikan TA 2020, dan Pengadaan Seragam Siswa SD TA 2020
17	29/10/2021	Surat Aduan warga masyarakat Dukuh Tanggal 29 Oktober 2021	Klarifikasi atas aduan warga masyarakat Dukuh pada Desa Dukuh Kecamatan Delanggu untuk Permohonan Audit
18	06/12/2021	Surat FORPAKK No: 02132/FORPAKK/2021 Tanggal 21 November 2021	Klarifikasi atas aduan Forum Peduli anti korupsi klaten (FORPAKK) perihal penyalahgunaan Dana BOS dan Prokes

## **BAB V**

### **SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Pandemi Covid-19 menyebabkan rencana pengawasan yang sudah tercantum dalam PKPT 2021, sebagian tidak terlaksana dengan baik. Program pengawasan terkendala termasuk di dalamnya program peningkatan kapasitas pegawai yang sudah terencana menggunakan metoda tatap muka terpaksa dibatalkan. Teknis pemerolehan data untuk pelaksanaan pengawasan maupun pelatihan pegawai diupayakan melalui komunikasi dalam jaringan (daring). Namun demikian, Inspektorat terus berupaya melaksanakan fungsinya sebagai APIP sesuai PP 60/2008 tentang SPIP, yaitu berperan dalam aktivitas penjaminan mutu, aktivitas konsultasi, dan aktivitas antikorupsi dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

#### **B. Hambatan:**

##### 1. Hambatan Internal :

- a. Tambahan-tambahan penugasan yang tidak terencana dalam PKPT terlalu banyak dibandingkan sumber daya yang dimiliki.
- b. Terbatasnya jumlah Auditor dibandingkan jumlah Obyek Audit.
- c. Masih kurangnya kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
- d. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan
- e. Pemberlakuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang menyebabkan tingkat kesejahteraan pegawai menurun.

##### 2. Hambatan Eksternal :

- a. Belum semua pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan, terutama pengelola keuangan desa
- b. Sangat luasnya wilayah kerja Inspektorat sehingga tidak semua obyek Audit dapat terjangkau pada setiap tahunnya.
- c. Belum optimalnya pengendalian intern di hampir semua auditan

d. Hasil revidir perencanaan dan penganggaran hanya dipakai secara formalitas, karena prosesnya dilaksanakan setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai.

**C. Saran :**

1. Untuk menambah kuantitas dan kompetensi para pejabat fungsional auditor dan P2UPD yang ada dilingkungan Inspektorat Kabupaten Klaten perlu adanya peningkatan kemampuan baik melalui Bimtek, PKS maupun pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat baik Diklat Fungsional yang tidak sebanding dengan jumlah auditor, maka PKPT harus fokus dan berbasis risiko
2. Perlu adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk terus memperbaiki sistem pengendalian intern
3. Optimalisasi dukungan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas pengawasan seperti penggunaan aplikasi simwas daring (online) yang terintegrasi
4. Memperkuat dan memperbanyak aktivitas konsultasi dan aktivitas antikorupsi sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.
5. Proses revidir perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara paralel.
6. Memperhitungkan/ mengevaluasi Kembali besaran TPP untuk APIP.

Klaten, 09 Februari 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**



**JAJANG PRIHONO, S.STP.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19810216 199912 1 001

# LAMPIRAN



## Lampiran 1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2005	16	9.352.373.838,00	27	4.509.359.216,00	26	3.869.959.216,00	1	639.400.000,00	0	-	0	-	3.869.959.216,00
2006	35	625.809.694,81	73	236.774.889,81	73	236.774.889,81	0	-	0	-	0	-	236.775.340,48
2007	25	590.461.792,04	57	607.821.792,04	56	607.821.792,04	1	-	0	-	0	-	695.756.786,68
2008	12	24.324.729,00	35	24.324.729,00	35	24.324.729,00	0	-	0	-	0	-	521.720.319,00
2009	8	1.314.960.000,00	22	0	22	0	0	-	0	-	0	-	-
2010	32	6.034.090.013,37	64	2.974.533.331,00	62	22.049.990,00	2	2.952.483.341,00	0	-	0	-	22.049.990,00
2011	26	439.995.350,00	49	202.995.350,00	48	202.995.350,00	1	-	0	-	0	-	202.995.350,00
2012	26	10.008.177.346,00	61	9.989.652.346,00	57	9.458.059.334,00	4	531.593.012,00	0	-	0	-	9.458.059.334,00
2013	28	1.638.815.516,52	72	1.521.796.067,52	71	1.521.796.067,52	1	-	0	-	0	-	1.526.489.556,52
2014	19	2.677.872.422,91	65	2.550.277.564,34	65	2.550.277.564,34	0	-	0	-	0	-	2.555.353.680,34
2015	21	4.714.033.332,13	63	3.243.136.696,35	60	3.166.186.696,35	3	76.950.000,00	0	-	0	-	4.637.083.810,54
2016	16	174.485.956,59	50	174.485.956,59	49	174.485.956,59	1	-	0	-	0	-	697.649.870,00
2017	18	3.228.203.762,33	67	3.228.203.762,33	62	3.072.643.562,33	5	155.560.200,00	0	-	0	-	3.246.430.541,23
2018	18	3.679.340.431,52	63	3.676.995.431,52	41	2.543.930.364,48	22	1.133.065.067,04	0	-	0	-	2.546.926.860,00
2019	23	821.873.038,55	53	576.871.802,24	28	286.581.872,24	25	290.289.930,00	0	-	0	-	1.572.363.164,33
2020	22	505.898.505,00	44	404.170.531,00	37	384.867.000,00	7	19.303.531,00	0	-	0	-	438.063.150,00
2021	11	462.713.516,32	18	462.713.516,32	11	462.713.516,32	7	-	0	-	0	-	34.895.372,00
<b>Total</b>	<b>356</b>	<b>46.293.429.245,09</b>	<b>883</b>	<b>34.384.112.982,06</b>	<b>803</b>	<b>28.157.649.754,66</b>	<b>80</b>	<b>5.798.645.081,04</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>32.262.572.341,12</b>

## Lampiran 2 Daftar Laporan Hasil Audit Reguler Tahun 2021

No	Audit	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Audit Dana BOS SMP N 4 Klaten	094/001/11.III	04/01/2021	700/004/11.III/L	09/02/2021
2	Audit Dana BOS SMP N 1 Kebonarum	094/002/11.III	04/01/2021	700/001/11.III/L	09/02/2021
3	Audit Dana BOS SMP N 2 Klaten	094/003/11.I	04/01/2021	700/008/11.I/L	09/02/2021
4	Audit Dana BOS SMP N 3 Cawas	094/005/11.II	04/01/2021	700/010/11.II/L	18/02/2021
5	Audit Dana BOS SMP N 1 Wedi	094/006/11.II	04/01/2021	700/022/11.II/L	15/03/2021
6	Audit Dana BOS SMP N 1 Juwiring	094/007/11.I	04/01/2021	700/020/11.I/L	15/03/2021
7	Audit Dana BOS SMP N 1 Karanganyar	094/008/11.IV	04/01/2021	700/006/11.IV/L	09/02/2021
8	Audit Dana BOS SMP N 1 Kalikotes	094/009/11.IV	04/01/2021	700/012/11.IV/L	05/03/2021
9	Audit Dana Desa Bulurejo, Kec. Juwiring	094/012/11.I	01/02/2021	700/014/11.I/L	10/03/2021
10	Audit Dana Desa Pasungan, Kec. Ceper	094/013/11.II	01/02/2021	700/031/11.II/L	13/04/2021
11	Audit Dana Desa Ngawonggo, Kec. Ceper	094/014/11.II	01/02/2021	700/027/11.II/L	13/04/2021
12	Audit Dana Desa Sapen, Kec. Manisrenggo	094/015/11.IV	01/02/2021	700/016/11.IV/L	10/03/2021
13	Audit Dana Desa Kebondalem Lor, Kec. Prambanan	094/016/11.III	01/02/2021	700/025/11.III/L	30/03/2021
14	Audit Dana Desa Bugisan, Kec. Prambanan	094/017/11.III	01/02/2021	700/018/11.III/L	15/03/2021
15	Audit Dana Desa Jaten, Kec. Juwiring	094/019/11.I	01/02/2021	700/033/11.II/L	30/04/2021
16	Audit Dana Desa Leses Kec. Manisrenggo	094/023/11.IV	01/02/2021	700/029/11.IV/L	13/04/2021
17	Audit Dana Desa Juwiring, Kec. Juwiring	094/065/11.I	01/04/2021	700/035/11.I/L	04/05/2021
18	Audit Dana Desa Banyuripan, Kec. Bayat	094/066/11.IV	01/04/2021	700/045/11.IV/L	28/05/2021
19	Audit Dana Desa Pereng, Kec. Prambanan	094/067/11.III	01/04/2021	700/037/11.III/L	04/05/2021
20	Audit Dana Desa Karanganyar, Kec. Klaten Utara	094/068/11.III	01/04/2021	700/043/11.III/L	27/05/2021
21	Audit Dana Desa Nengahan, Kec. Bayat	094/069/11.IV	01/04/2021	700/039/11.IV/L	17/05/2021
22	Audit Dana Desa Srebegan, Kec. Ceper	094/070/11.II	01/04/2021	700/041/11.IV/L	19/05/2021
23	Audit Dana Desa Canan, Kec. Wedi	094/071/11.II	01/04/2021	700/049/11.II/L	02/06/2021
24	Audit Dana Desa Taji, Kec. Juwiring	094/072/11.I	01/04/2021	700/047/11.I/L	02/06/2021
25	Audit Dana Desa Kenaiban, Kec. Juwiring	094/073/11.I	03/05/2021	700/051/11.I/L	02/06/2021
26	Audit Dana Desa Jarum, Kec. Bayat	094/074/11.IV	03/05/2021	700/057/11.IV	24/06/2021

No	Audit	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
27	Audit Dana Desa Krakitan, Kec. Bayat	094/075/11.IV	03/05/2021	700/061/11.IV	30/07/2021
28	Audit Dana Desa Planggu, Kec. Trucuk	094/076/11.I	03/05/2021	700/065/11.I/L	02/08/2021
29	Audit Dana Desa Jebugan, Kec. Klaten Utara	094/077/11.III	03/05/2021	700/055/11.III	24/06/2021
30	Audit Dana Desa Basin, Kec. Kebonarum	094/078/11.III	03/05/2021	700/059/11.III	28/06/2021
31	Audit Dana Desa Sidoharjo, Kec. Polanharjo	094/079/11.II	03/05/2021	700/067/11.II/L	12/08/2021
32	Audit Dana Desa Wangen, Kec. Polanharjo	094/080/11.II	03/05/2021	700/053/11.II/L	14/06/2021
33	Audit Dana Desa Gemblegan, Kec. Kalikotes	094/082/11.IV	02/06/2021	700/063/11.IV/L	02/08/2021
34	Audit Dana Desa Demangan, Kec. Karangdowo	094/083/11.I	02/06/2021	700/069/11.1/LHA	12/08/2021
35	Audit Dana Desa Gadungan, Kec. Wedi	094/084/11.II	02/06/2021	700/071/11.II/L	12/08/2021
36	Audit Dana Desa Tambongwetan, Kec. Kalikotes	094/085/11.IV	02/06/2021	700/073/11.IV/L	12/08/2021
37	Audit Dana Desa Kapungan, Kec. Polanharjo	094/086/11.II	02/06/2021	700/077/11.II/L	24/09/2021
38	Audit Dana Desa Gedongjetis, Kec. Tulung	094/087/11.I	02/06/2021	700/075/11.I	12/08/2021

### Lampiran 3 Daftar Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021

No	Audit dengan Tujuan Tertentu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Penilaian Kriteria Probitas Audit pada Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pendidikan Klaten	094/010/11	04/01/2021	700/003/11.K	09/02/2021
2	Audit dengan tujuan tertentu terhadap kepatuhan pelayanan perijinan dan non perijinan pada DPMPTSP Klaten tahun 2021	094/041/11.III	02/06/2021	700/045/11.III/L	30/07/2021
3	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Ngawen	094/003/11.IV	01/02/2021	700/013/11.IV	24/02/2021
4	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Klaten Tengah	094/003/11.IV	01/02/2021	700/014/11.IV	24/02/2021
5	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Dinas Kesehatan	094/004/11.I	01/02/2021	700/002/11.I	24/02/2021
6	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada RSUD Bagas Waras	094/005/11.I	01/02/2021	700/003/11.I	24/02/2021
7	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Prambanan	094/006/11.III	01/02/2021	700/009/11.III	24/02/2021
8	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Kebondalem	094/007/11.III	01/02/2021	700/010/11.III	24/02/2021
9	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Cawas 2	094/008/11.II	01/02/2021	700/005/11.II	24/02/2021
10	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jambukulon	094/009/11.II	01/02/2021	700/006/11.II	24/02/2021
11	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Karangnongko	094/010/11.II	01/02/2021	700/008/11.II	24/02/2021
12	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Polanharjo	094/011/11.II	01/02/2021	700/007/11.II	24/02/2021
13	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan I	094/012/11.III	01/02/2021	700/011/11.III	24/02/2021
14	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan II	094/013/11.III	01/02/2021	700/012/11.III	24/02/2021
15	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Bayat	094/014/11.IV	01/02/2021	700/016/11.IV	24/02/2021
16	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Kalikotes	094/015/11.IV	01/02/2021	700/015/11.IV	24/02/2021
17	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Klaten Selatan	094/016/11.I	01/02/2021	700/004/11.I	24/02/2021
18	Lap Kompilasi Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 Se-Kab Klaten	094/004/11.I	01/02/2021	700/017/11	25/02/2021
19	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan I Tahap II	094/016.1/11.III	24/03/2021	700/019/11.III	24/04/2021
20	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan II Tahap II	094/016.2/11.III	24/03/2021	700/020/11.III	24/04/2021
21	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Prambanan Tahap II	094/016.3/11.III	24/03/2021	700/021/11.III	24/04/2021
22	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Kebondalem Lor Tahap II	094/016.4/11.III	24/03/2021	700/022/11.III	24/04/2021
23	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan I Tahap III	094/020/11.III	19/04/2021	700/023/11.III	18/05/2021

No	Audit dengan Tujuan Tertentu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
24	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan II Tahap III	094/021/11.III	19/04/2021	700/024/11.III	18/05/2021
25	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Prambanan Tahap III	094/022/11.III	19/04/2021	700/031/11.III	28/05/2021
26	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Kebondalem Lor Tahap III	094/023/11.III	19/04/2021	700/032/11.III	28/05/2021
27	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan I Tahap IV	094/024/11.III	03/05/2021	700/037/11.III	28/05/2021
28	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan II Tahap IV	094/025/11.III	03/05/2021	700/038/11.III	28/05/2021
29	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Prambanan Tahap IV	094/026/11.III	03/05/2021	700/033/11.III	28/05/2021
30	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Kebondalem Lor Tahap IV	094/027/11.III	03/05/2021	700/034/11.III	28/05/2021
31	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Dinas Kesehatan	094/029/11.I	07/05/2021	700/041/11.IV	28/05/2021
32	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 Se-Kabupaten Klaten (Kompilasi)	094/042/11.I	02/06/2021	700/042/11.IV	04/06/2021
33	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Ngawen	094/030/11.IV	07/05/2021	700/035/11.IV	28/05/2021
34	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Klaten Tengah	094/031/11.IV	07/05/2021	700/036/11.IV	28/05/2021
35	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada RSUD Bagas Waras	094/032/11.I	07/05/2021	700/029/11.I	28/05/2021
36	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Klaten Selatan	094/033/11.I	07/05/2021	700/030/11.I	28/05/2021
37	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Cawas 2	094/034/11.II	07/05/2021	700/025/11.II	28/05/2021
38	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jambukulon	094/035/11.II	07/05/2021	700/026/11.II	28/05/2021
39	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Karangnongko	094/036/11.II	07/05/2021	700/027/11.II	28/05/2021
40	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Polanharjo	094/037/11.II	07/05/2021	700/028/11.II	28/05/2021
41	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Bayat	094/038/11.IV	17/05/2021	700/039/11.IV	28/05/2021
42	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Kalikotes	094/039/11.IV	17/05/2021	700/040/11.IV	28/05/2021
43	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Trucuk 1	094/049/11.I	02/09/2021	700/048/11.I/L	15/09/2021
44	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Majegan	094/050/11.I	02/09/2021	700/049/11.I/L	15/09/2021
45	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jambukulon	094/051/11.II	02/09/2021	700/054/11.II/L	17/09/2021



No	Audit dengan Tujuan Tertentu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
46	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Polanharjo	094/052/11.II	02/09/2021	700/055/11.II/L	17/09/2021
47	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan 1	094/053/11.III	02/09/2021	700/050/11.III/L	15/09/2021
48	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan 2	094/054/11.III	02/09/2021	700/053/11.III/L	17/09/2021
49	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Klaten Tengah	094/055/11.IV	02/09/2021	700/51/11.IV	17/09/2021
50	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Ngawen	094/056/11.IV	02/09/2021	700/52/11.IV	17/09/2021
51	Pengawasan Stok Opname Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Dinas kesehatan	094/057/11.I	02/09/2021	700/056/11.I/L	17/09/2021
52	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan 1	094/061/11.III	11/10/2021	700/058/11.III	19/10/2021
53	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan 2	094/062/11.III	11/10/2021	700/059/11.III	19/10/2021
54	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Majegan	094/063/11.I	11/10/2021	700/065/11.I	29/10/2021
55	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Dinas Kesehatan	094/064/11.I	11/10/2021	700/066/11.I	29/10/2021
56	Kompilasi Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19			700/067/11	29/10/2021
57	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Klaten Tengah	094/065/11.IV	11/10/2021	700/062/11.IV	19/10/2021
58	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Ngawen	094/066/11.IV	11/10/2021	700/063/11.IV	19/10/2021
59	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jambu Kulon	094/067/11.II	11/10/2021	700/061/11.II	19/10/2021
60	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Polanharjo	094/068/11.II	11/10/2021	700/060/11.II	19/10/2021
61	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan 1	094/080/11.III	17/11/2021	700/076/11.III	03/12/2021
62	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jogonalan 2	094/081/11.III	17/11/2021	700/077/11.III	03/12/2021
63	Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Majegan	094/073/11.I	01/11/2021	700/072/11.I	03/12/2021

No	Audit dengan Tujuan Tertentu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
64	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Dinas Kesehatan	094/074/11.I	01/11/2021	700/073/11.I	03/12/2021
65	Kompilasi Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19			700/080/11	03/12/2021
66	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Klaten Tengah	094/078/11.IV	15/11/2021	700/078/11.IV	03/12/2021
67	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Ngawen	094/079/11.IV	15/11/2021	700/079/11.IV	03/12/2021
68	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Jambu Kulon	094/075/11.II	12/11/2021	700/074/11.II	03/12/2021
69	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 pada Puskesmas Polanharjo	094/076/11.II	12/11/2021	700/075/11.II	03/12/2021
70	Audit dengan tujuan tertentu belanja dana Desa Plawikan Kec Jogonalan	094/060/11.III	06/10/2021	700/071/11.III/L	29/11/2021
71	Audit dengan tujuan tertentu belanja dana Desa Blimbing kec karangnongko	094/086/11.II/K	01/12/2021	700/096/11.II/L	31/12/2021
72	Audit dengan tujuan tertentu belanja dana Desa Daleman kec tulung	094/085/11.I/K	01/12/2021	700/092/11.I/L	31/12/2021
73	Audit dengan tujuan tertentu belanja dana Desa Pepe ken ngawen	094/058.1/11.IV	01/10/2021	700/090/11.IV	31/12/2021
74	Pengadaan Barang dan Jasa Alat Material Kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 s/d triwulan III TA 2021 Dinas Kesehatan	094/040/11	12/10/2021	700/069/11.I/L	12/11/2021
75	Audit dengan tujuan tertentu atas paket pekerjaan pembuatan bilik isolasi covid 19 thp I senilai 192,170,000	094/048.1/11.IV	01/09/2021	700/056.1/11.IV/LK	27/09/2021
76	Audit dengan tujuan tertentu atas paket pekerjaan pembuatan bilik isolasi covid 19 thp II	094/071/11.IV/K	11/10/2021	700/084/11.IV/LK	30/12/2021
77	Probit Audit Pembangunan Proyek Strategis Pada keg Pembangunan Gedung BPBD Kab Klaten Th 2021	094/083/11	01/12/2021	700/094/11	31/12/2021
78	Probit Audit atas serah terima keg Pembangunan Taman Kuliner TA 2021	094/087/11.III	01/12/2021	700/082/11.III	24/12/2021
79	Probit Audit pada pembangunan gedung mall pelayanan publik (MPP)	094/088/11.IV	01/12/2021	700/089/11.IV	31/12/2021
80	Probit Audit Pembangunan Proyek Strategis Pada keg Pembangunan Puskesmas Jambu Kulon Kec Ceper	094/092/11.I	15/12/2021	700/098/11.I	31/12/2021
81	Probit Audit Pembangunan Proyek Strategis Pada keg Pembangunan TPA	094/091/11.II	06/12/2021	700/095/11.II	31/12/2021
82	Verval Bukti Pajak Dana Desa Ta 2019 dan Bankeu Ta 2019 pada Ds. Kraguman, Jogonalan	094/001/11.III/K	21/01/2021	700/001/11.III	25/01/2021
83	LHA APBdes dan Pajak PPn,PPH Ds Tegalorejo,Kec. Bayat TA 2019	094/053/11.IV	01/12/2020	700/018/11.IV/L.K	08/03/2021
84	Laporan hasil audit belanja tak terduga di Disperwaskim	094/004/11.IV	04/01/2021	700/024/11.IV/L	30/03/2021
85	Audit perhitungan kerugian daerah (perpanjangan hari pelaksanaan) atas perihal laporan kendaraan dinas hilang dan kendaraan dinas tidak diserahkan	094/017/11 094/019/11	29/03/2021 01/04/2021	700/044/11	30/07/2021

No	Audit dengan Tujuan Tertentu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
86	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	094/028/11.I	05/05/2021	700/043/11.I	10/06/2021
87	Audit investigasi pada Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan atas : 1. Bantuan RTLH TA 2019 2. Rehab talud Sri Rondo TA 2020 3. Pengadaan Kipas Angin Kantor Desa Kraguman 4. Pembangunan MCK di Balai Desa 5. Pembangunan Sumur di Balai Desa	094/044/11.III.K	07/06/2021	700/047/11.III/L	16/08/2021
88	Perhitungan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan dari anggraan APBDes TA 2019 Desa Tegalorejo, Kec Bayat	094/070/11.IV/K	11/10/2021	700/068/11.I/L	12/11/2021
89	Audit Investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan TA 2019 Desa Soka, Kec Karangdowo Kab.Klaten	094/043/11.I	02/06/2021	700/057/11.I/L	04/10/2021
90	Audit Investigasi pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa TA 2019 s.d 2021 di Desa Bendo Kec Pedan	094/072/11.III/K	18/10/2021	700/083/11.III/LK	27/12/2021
91	Audit investigasi berdasarkan permohonan audit dari kepolisian negara republik indonesia resor Klaten atas dugaan pungutan liar dalam Program Prona Desa Brangkal Kec Karangnom TA 2017	094/070.1/11.IV/K	11/10/2021	700/085/11.IV/LK	30/12/2021
92	Audit investigasi lanjutan dalam pengelolaan BUMDEs Tirta Mandiri Desa Ponggok Kec Polanharjo TA 2016 s.d 2018	094/082/11.II.K	01/12/2021	700.3/001/11/2/2022	17/01/2022

#### Lampiran 4 Daftar Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021

No	Evaluasi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Kemalang)	094/096/11.I	02/08/2021	700/049/11.LHE	12/08/2021
2	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Tulung)	094/099/11.I	02/08/2021	700/050/11.LHE	12/08/2021
3	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Klaten Selatan)	094/097/11.I	02/08/2021	700/066/11.LHE	12/08/2021
4	SAKIP Tahun 2020 (Dinas Kesehatan)	094/096/11.I	02/08/2021	700/067/11.LHE	12/08/2021
5	SAKIP Tahun 2020 (Dispermasdes)	094/098/11.I	02/08/2021	700/071/11.LHE	12/08/2021
6	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Juwiring)	094/099/11.I	02/08/2021	700/096/11.LHE	12/08/2021
7	SAKIP Tahun 2020 (Disdagkop dan UKM)	094/101.1/11.I	02/08/2021	700/062/11.LHE	12/08/2021
8	SAKIP Tahun 2020 (BPKD)	094/101.2/11.I	02/08/2021	700/064/11.LHE	12/08/2021
9	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Trucuk)	094/101.3/11.I	02/08/2021	700/068/11.LHE	12/08/2021
10	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Karangdowo)	094/101.4/11.I	02/08/2021	700/070/11.LHE	12/08/2021
11	SAKIP Tahun 2020 (Sekretariat Daerah)	094/101.5/11.I	02/08/2021	700/086/11.LHE	12/08/2021
12	SAKIP Tahun 2020 (BPBD)	094/101.6/11.I	02/08/2021	700/095/11.LHE	12/08/2021
13	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Karangnongko)			700/052/11.LHE	12/08/2021
14	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Cawas)	094/101/11.II	02/08/2021	700/054/11.LHE	12/08/2021
15	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Ceper)			700/055/11.LHE	12/08/2021
16	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Gantiwarno)			700/056/11.LHE	12/08/2021
17	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Wedi)			700/057/11.LHE	12/08/2021
18	SAKIP Tahun 2020 (BKPPD)	094/100/11.II	02/08/2021	700/058/11.LHE	12/08/2021
19	SAKIP Tahun 2020 (Dinas Arsip dan Perpustakaan)			700/059/11.LHE	12/08/2021
20	SAKIP Tahun 2020 (Sekretariat DPRD)			700/060/11.LHE	12/08/2021
21	SAKIP Tahun 2020 (Dispernaker)	094/101/11.II	02/08/2021	700/061/11.LHE	12/08/2021
22	SAKIP Tahun 2020 (Dinas Sosial P3A KB)	094/101/11.II	02/08/2021	700/069/11.LHE	12/08/2021
23	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Polanharjo)			700/072/11.LHE	12/08/2021
24	SAKIP Tahun 2020 (DPUPR)	094/100/11.II	02/08/2021	700/074/11.LHE	12/08/2021
25	SAKIP Tahun 2020 (Kesbangpol)	094/090.17/11.III	07/07/2021	700/053/11.LHE	12/08/2021

No	Evaluasi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
26	SAKIP Tahun 2020 (Dinas Perhubungan)	094/090.18/11.III	07/07/2021	700/073/11.LHE	12/08/2021
27	SAKIP Tahun 2020 (DPMPTSP)	094/090.19/11.III	07/07/2021	700/075/11.LHE	12/08/2021
28	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Jogonalan)	094/090.20/11.III	07/07/2021	700/076/11.LHE	12/08/2021
29	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Delanggu)	094/090.21/11.III	07/07/2021	700/077/11.LHE	12/08/2021
30	SAKIP Tahun 2020 (DLHK)	094/090.22/11.III	07/07/2021	700/078/11.LHE	12/08/2021
31	SAKIP Tahun 2020 (Satpol PP)	094/090.23/11.III	07/07/2021	700/084/11.LHE	12/08/2021
32	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Prambanan)	094/090.24/11.III	07/07/2021	700/085/11.LHE	12/08/2021
33	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Kebonarum)	094/090.25/11.III	07/07/2021	700/090/11.LHE	12/08/2021
34	SAKIP Tahun 2020 (Dispertan)	094/090.26/11.III	07/07/2021	700/091/11.LHE	12/08/2021
35	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Jatinom)	094/090.27/11.III	07/07/2021	700/092/11.LHE	12/08/2021
36	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Pedan)	094/090.28/11.III	07/07/2021	700/093/11.LHE	12/08/2021
37	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Klaten Utara)	094/090.29/11.III	07/07/2021	700/094/11.LHE	12/08/2021
38	SAKIP Tahun 2020 (Dinas Pendidikan)	094/090.5/11.IV	07/07/2021	700/046/11.LHE	12/08/2021
39	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Karanganyar)	094/090.6/11.IV	07/07/2021	700/047/11.LHE	12/08/2021
40	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Ngawen)	094/090.7/11.IV	07/07/2021	700/048/11.LHE	12/08/2021
41	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Klaten Tengah)	094/090.8/11.IV	07/07/2021	700/051/11.LHE	12/08/2021
42	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Manisrenggo)	094/090.9/11.IV	07/07/2021	700/063/11.LHE	12/08/2021
43	SAKIP Tahun 2020 (Bappeda)	094/090.10/11.IV	07/07/2021	700/065/11.LHE	12/08/2021
44	SAKIP Tahun 2020 (Disdukcapil)	094/090.11/11.IV	07/07/2021	700/079/11.LHE	12/08/2021
45	SAKIP Tahun 2020 (Disperwaskim)	094/090.12/11.IV	07/07/2021	700/080/11.LHE	12/08/2021
46	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Wonosari)	094/090.13/11.IV	07/07/2021	700/081/11.LHE	12/08/2021
47	SAKIP Tahun 2020 (Diskominfo)	094/090.14/11.IV	07/07/2021	700/082/11.LHE	12/08/2021
48	SAKIP Tahun 2020 (Inspektorat)	094/100.1/11.IV	02/08/2021	700/083/11.LHE	12/08/2021
49	SAKIP Tahun 2020 (Disparbudpora)	094/100.1/11.IV	02/08/2021	700/087/11.LHE	12/08/2021
50	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Bayat)	094/090.15/11.IV	07/07/2021	700/088/11.LHE	12/08/2021
51	SAKIP Tahun 2020 (Kecamatan Kalikotes)	094/090.16/11.IV	07/07/2021	700/089/11.LHE	12/08/2021
52	PMPRB Dukcapil	094/089.3/11.IV	30/06/2021	700/44.7/11/LHE	16/07/2021
53	PMPRB Disbudparpora Tahun 2020	094/089.1/11	18/06/2021	700/044.1/11.I	30/06/2021
54	Penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa TW 3 TA 2021	094/234/11	20/09/2021	700/237/11/LHE	05/10/2021

No	Evaluasi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
55	Benturan kepentingan pada Disdukcapil kab Klaten	094/389/11.IV	01/12/2021	700/448/11.IV	27/12/2021
56	Penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa TW 4 TA 2021	094/382/11	30/11/2021	700/441/11	08/12/2021



## Lampiran 5 Daftar Laporan Hasil Pendampingan/ Asistensi Tahun 2021

No	Pendampingan/ Asistensi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/090.4/11.I	07/07/2021	700/44.3/11.I	16/07/2021
2	Monev pengawalan penyederhanaan perijinan perusahaan	094/090.1/11.II	01/07/2021	700/44.4/11.II	16/07/2021
3	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/036.1-2/11.III	07/07/2021	700/44.5/11.III	16/07/2021
4	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/090.3/11.IV	01/07/2021	700/44.6/11.IV	16/07/2021
5	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/093/11.I	16/07/2021	700/045.3/11.I	30/07/2021
6	Monev pengawalan penyederhanaan perijinan perusahaan	094/090.2/11	09/07/2021	700/045.6/11.II	30/07/2021
7	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/050.1-2/11.11	16/07/2021	700/045.7/11.III	30/07/2021
8	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/090.3/11.IV	16/07/2021	700/045.4/11.IV	30/07/2021
9	Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Perusahaan	094/102/11.II	02/08/2021	700/099.2/11.II	16/08/2021
10	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/102.1/11.I	02/08/2021	700/102/11.I	25/08/2021
11	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/102.3/11.III	02/08/2021	700/099.1/11.III	16/08/2021
12	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/102.2/11.IV	02/08/2021	700/103/11.IV	25/08/2021
13	Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Perusahaan	094/103/11.II	16/08/2021	104	30/08/2021
14	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/108/11.I	16/08/2021	700/108/11.I	31/08/2021
15	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/110/11.III	16/08/2021	700/105/11.III	30/08/2021
16	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/109/11.IV	16/08/2021	700/109/11.IV	31/08/2021
17	Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Perusahaan	094/170.1/11.I	01/09/2021	700/175.3/11.II	16/09/2021
18	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/170.4/11.II	01/09/2021	700/175.1/11.I	16/09/2021
19	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/170.3/11.III	01/09/2021	700/175.2/11.III	16/09/2021
20	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/170.2/11.IV	01/09/2021	700/175/11.IV	16/09/2021
21	Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Perusahaan	094/231/11.I	16/09/2021	700/235.3/11.II	30/09/2021
22	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/231.1/11.II	16/09/2021	700/235.1/11.1	30/09/2021

No	Pendampingan/ Asistensi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
23	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/233/11.III	16/09/2021	700/235.2/11.III	30/09/2021
24	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/232/11.IV	16/09/2021	700/235.4/11.IV	30/09/2021
25	Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Perusahaan	094/236.5/11.II	01/10/2021	700/244.2/11.II	18/10/2021
26	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/236.4/11.I	01/10/2021	700/244.1/11.I	18/10/2021
27	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/236.3/11.III	01/10/2021	700/243.1/11.III	15/10/2021
28	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/236.6/11.IV	01/10/2021	700/244.3/11.IV	18/10/2021
29	Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Perusahaan	094/248.2/11.II	15/10/2021	700/361.3/11.II	01/11/2021
30	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/248.1/11.I	15/10/2021	700/361.2/11.I	01/11/2021
31	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/249/11.III	18/10/2021	700/361.1/11.III	30/10/2021
32	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/248.3/11.IV	15/10/2021	700/361.4/11.IV	01/11/2021
33	Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Perusahaan	094/309.4/11.II	01/11/2021	700/368.2/11.II	15/11/2021
34	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/309.3/11.I	01/11/2021	700/368.1/11.I	15/11/2021
35	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/309.2/11.III	01/11/2021	700/368.3/11.III	15/11/2021
36	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/309.5/11.IV	01/11/2021	700/368.4/11.IV	15/11/2021
37	Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Perusahaan	094/380.1/11.II	16/11/2021	700/432.2/11.II	30/11/2021
38	Monev berkelanjutan terhadap penyerapan APBD	094/380/11.I	16/11/2021	700/432.1/11.I	30/11/2021
39	Monev pengawalan PPKM darurat/mikro Tahun 2021	094/379/11.III	16/11/2021	700/432.3/11.III	30/11/2021
40	Monev pelaksanaan PPKM ruang lingkup pengawalan PPKM berbasis mikro Tahun 2021 ( Pengawasan vaksin)	094/380.2/11.IV	16/11/2021	700/432.4/11.IV	30/11/2021
41	Pendampingan perubahan RKA BOK Kabupaten dan Puskesmas	094/092/11.I	12/07/2021	700/097/11	06/08/2021
42	Monev Pembangunan proyek strategis pada keg pembangunan gedung kecamatan Cawas	094/237.3/11.IV	01/10/2021	700/300/11.IV	25/10/2021
43	Monev pembangunan Proyek Strategis pada keg Penataan ruang terbuka hijau jalan irian	094/238/11.I	05/10/2021	700/247/11.I	21/10/2021
44	Monev pembangunan Proyek Strategis pada keg Pembangunan Puskesmas Jambukulon	094/239/11.I	06/10/2021	700/246/11.I	21/10/2021

No	Pendampingan/ Asistensi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
45	monitoring pelaksanaan pembangunan gedung pertemuan buntalan dan taman kuliner Tahun 2021	094/243/11.III	06/10/2021	700/362/11.III	02/11/2021
46	Pengawasan berupa monitoring atas pelaksanaan pembangunan mall pelayanan publik TA 2021	094/244/11.IV	11/10/2021	700/301/11.IV	25/10/2021
47	Monev pembangunan proyek strategis pd kegiatan penataan tempat pembuangan akhir (TPA) Troketon di Ds Troketon Kec Pedan Tahun 2021	094/247/11.II	11/10/2021	700/299/11.II	21/10/2021
48	Monev pembangunan proyek strategis pd kegiatan pembangunan gedung BPBD Kab Klaten Tahun 2021	094/248/11.II	11/10/2021	700/245/11.II	21/10/2021
49	Monev pembangunan proyek strategis pd kegiatan penataan tempat pembuangan akhir (TPA) Troketon di Ds Troketon Kec Pedan Tahun 2021	094/311.1/11.II	02/11/2021	700/370/11.II	18/11/2021
50	Monev pembangunan proyek strategis pada keg pembangunan gedung BPBD	094/310/11.II	01/11/2021	700/368/11.II	12/11/2021
51	Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan CAT SKD Pengadaan CPNS Kab Klaten 2021	094/236/11.II	01/10/2021	700/302/11.II	25/10/2021
52	Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan CAT SKB kabupaten Klaten	094/383/11.II	01/12/2021	700/440/11.II/2021	08/12/2021

## Lampiran 6 Daftar Laporan Hasil Reviu Tahun 2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2020	094/011/11	01/02/2021	700/001/11	09/02/2021
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD	094/018/11.IV	01/02/2021	700/003/11.IV	10/02/2021
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP	094/020/11.IV	01/02/2021	700/004/11.IV	10/02/2021
4	DAK Fisik Reguler Sub Bidang KB Tahap III Tahun 2020	094/021/11.I	01/02/2021	700/002/11.I	09/02/2021
5	DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan	094/022/11.II	01/02/2021	700/009/11.II	17/02/2021
6	DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Pertanian TA 2020	094/024/11.III	01/02/2021	700/005/11.III	10/02/2021
7	Cadangan DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Pertanian TA 2020	094/025/11.III	01/02/2021	700/006/11.III	10/02/2021
8	DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata Tahun 2020	094/241/11.IV	13/11/2020	700/007/11.IV	10/02/2021
9	DAK Fisik bidang Irigasi Tahun 2020 (cadangan)	094/027/11.II	10/02/2021	700/008/11.II	17/02/2021
10	DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Dispertan PP Tahun 2021	094/088.1/11.III	02/06/2021	700/042/11.III	28/06/2021
11	DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi DLHK Tahun 2021	094/088.2/11.III	02/06/2021	700/043/11.III	28/06/2021
12	LPPD TA 2021	094/028/11.II	22/02/2021	700/010/11	08/03/2021
13	LKPD TA 2020	094/029/11	01/03/2021	700/011/11	31/03/2021
14	DAK Fisik Sub Bid Keluarga Berencana di DinsosP3AKB tahap 1 2021	094/111/11.II	24/08/2021	700/111/11.II	31/08/2021
15	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi DPUPR tahap 1 2021	094/171/11.II		700/173/11.II	10/09/2021
16	DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi tahap 1 2021	094/171.1/11.IV	01/09/2021	700/174/11.IV	14/09/2021
17	DAK Fisik Penugasan Bidang Perumahan tahap 1 2021	094/171.2/11.IV	01/09/2021	700/234/11.IV	24/09/2021
18	DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum	094/171.3/11.IV	01/09/2021	700/236/11.IV	05/10/2021
19	DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata tahap 1 2021	094/171.4/11.IV	01/09/2021	700/235/11	24/09/2021
20	Kontrak dan SPK DAK Fisik penugasan kelautan dan perikanan pada Dispertan PP Kab Klaten 2021	-	-	700/040.1/11.III	02/06/2021
21	SPK untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat/sisten pemantauan kualitas air secara kontiyu, otomatis dan online pada DLHK Kab Klaten	-	-	700/045.1/11.III/2021	30/07/2021
22	SPK DAK fisik penugasan pada Dispertan PP Tahun 2021	-	-	700/045.2/11.III/2021	30/07/2021
23	Pencairan tahap I dan kelengkapan dokumen DAK Fisik pada DLHK			700/099/11.III/2021	06/08/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
24	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub bidang SKB Tahap 1 Tahun 2021	094/094/11.IV	02/08/2021	700/098/11.IV	06/08/2021
25	DAK Disperinaker TA 2021	094/104/11.II	16/08/2021	700/110/11.II	31/08/2021
26	DAK bidang jalan tahap I DPUPR	094/105/11.II	16/08/2021	700/100/11.II	25/08/2021
27	DAK Fisik reguler Bid Pendidikan Sub Bidang SKB Tahap 2 2021	094/237/11.IV	01/10/2021	700/238/11.IV	06/10/2021
28	DAK Disperwaskim urusan Air minum tahap II 2022	094/237.2/11.IV	01/10/2021	700/442/11.IV	13/12/2021
29	DAK Fisik reguler Bid Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap 1 2021	094/240/11.IV	06/10/2021	700/239/11.IV	08/10/2021
30	DAK Fisik reguler Bid Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 1 2021	094/241/11.IV	06/10/2021	700/240/11.IV	08/10/2021
31	DAK Fisik penugasan Dispertan 2021	094/242/11.III	06/10/2021	700/241/11.III	08/10/2021
32	DAK Fisik Penugasan bidang sanitasi tahap II Tahun 2021 (disperwaskim)	094/236.2/11.IV	01/10/2021	700/242/11	07/10/2021
33	DAK Fisik Sub Bid Keluarga Berencana di DinsosP3AKB tahap II 2021	094/245/11.II	11/10/2021	700/244/11.II/2021	18/10/2021
34	DAK Bidang industri kecil menengah pada Disperinaker TA 2021	094/246/11.II	11/10/2021	700/243/11.II	15/10/2021
35	DAK Fisik bidang pendidikan sub bidang SMP Tahap 2 2021	094/313/11.IV	05/11/2021	700/362.1/11.IV	10/11/2021
36	DAK Fisik bidang jalan tahap II di DPUPR	094/315/11.II	05/11/2021	700/437/11.II	07/12/2021
37	DAK Fisik reguler Bid Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 2 2021	094/378.1/11.IV	10/11/2021	700/371/11.IV	25/11/2021
38	DAK Bidang industri kecil menengah pada Disperinaker TA 2021 tahap 2	094/376/11.II	05/11/2021	700/373/11.II	25/11/2021
39	DAK Bidang sanitasi DLHK tahap 2	094/377/11.III	05/11/2021	700/369/11.III	18/11/2021
40	DAK Sub Bidang Pertanian (Ketahanan Pangan) DLHK tahap 2	094/378/11.III	05/11/2021	700/435/11.III	07/12/2021
41	DAK Fisik Bidang Irigasi DPUPR tahap II	094/381/11.II	22/11/2021	700/438/11.II	07/12/2021
42	DAK Fisik Perikanan dan Kelautan DPKPP			700/372/11.III	25/11/2021
43	DAK reguler bidang kesehatan dan KB sub bidang KB dan kesehatan reproduksi tahap 2 dan 4 Tahun 2021	094/385/11.II	01/12/2021	700/439/11.II	08/12/2021
44	DAK bidang pariwisata tahap 2	094/386/11.IV	01/12/2021	700/434/11.IV	06/12/2021
45	Kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang perumahan sbg syarat tf tahap 2	094/387/11.IV	01/12/2021	700/433/11.IV	06/12/2021
46	DAK Fisik bidang kesehatan dan KB sub bidang Pelayanan Dasar TA 2021 Dinkes	094/388/11.I	01/12/2021	700/436/11.I	07/12/2021
47	BLUD Puskesmas Trucuk 1	094/049/11.I	01/03/2021	700/035/11	31/03/2021
48	BLUD Puskesmas Trucuk 2	094/050/11.I	01/03/2021	700/036/11	31/03/2021
49	BLUD Puskesmas Karangdowo	094/052/11.I	01/03/2021	700/037/11	31/03/2021
50	BLUD Puskesmas Juwiring	094/053/11.I	01/03/2021	700/038/11	31/03/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
51	BLUD Puskesmas Klaten Selatan	094/034/11.I	01/03/2021	700/023/11	31/03/2021
52	BLUD Puskesmas Kemalang	094/035/11.I	01/03/2021	700/024/11	31/03/2021
53	BLUD Puskesmas Tulung	094/036/11.I	01/03/2021	700/039/11	31/03/2021
54	BLUD Puskesmas Majegan	094/037/11.I	01/03/2021	700/025/11	31/03/2021
55	BLUD Puskesmas Karangnongko	094/039/11.II	01/03/2021	700/011.1/11	31/03/2021
56	BLUD Puskesmas Wedi	094/040/11.II	01/03/2021	700/012/11	31/03/2021
57	BLUD Puskesmas Jambukulon	094/041/11.II	01/03/2021	700/013/11	31/03/2021
58	BLUD Puskesmas Cawas 1	094/042/11.II	01/03/2021	700/014/11	31/03/2021
59	BLUD Puskesmas Cawas 2	094/043/11.II	01/03/2021	700/015/11	31/03/2021
60	BLUD Puskesmas Gantiwarno	094/044/11.II	01/03/2021	700/016/11	31/03/2021
61	BLUD Puskesmas Ceper	094/045/11.II	01/03/2021	700/017/11	31/03/2021
62	BLUD Puskesmas Polanharjo	094/046/11.II	01/03/2021	700/018/11	31/03/2021
63	BLUD Puskesmas Jogonalan 1	094/030/11.III	01/03/2021	700/028/11	31/03/2021
64	BLUD Puskesmas Jogonalan 2	094/031/11.III	01/03/2021	700/029/11	31/03/2021
65	BLUD Puskesmas Prambanan	094/032/11.III	01/03/2021	700/026/11	31/03/2021
66	BLUD Puskesmas Kebondalem Lor	094/033/11.III	01/03/2021	700/027/11	31/03/2021
67	BLUD Puskesmas Klaten Utara	094/054/11.III	01/03/2021	700/030/11	31/03/2021
68	BLUD Puskesmas Wonosari 1	094/057/11.IV	01/03/2021	700/032/11	31/03/2021
69	BLUD Puskesmas Wonosari 2	094/058/11.IV	01/03/2021	700/031/11	31/03/2021
70	BLUD Puskesmas Manisrenggo	094/059/11.IV	01/03/2021	700/019/11	31/03/2021
71	BLUD Puskesmas Ngawen	094/060/11.IV	01/03/2021	700/020/11	31/03/2021
72	BLUD Puskesmas Karanganom	094/061/11.IV	01/03/2021	700/021/11	31/03/2021
73	BLUD Puskesmas Klaten Tengah	094/062/11.IV	01/03/2021	700/022/11	31/03/2021
74	BLUD Puskesmas Kalikotes	094/063/11.IV	01/03/2021	700/034/11	31/03/2021
75	BLUD Puskesmas Bayat	094/064/11.IV	01/03/2021	700/033/11	31/03/2021
76	RKPD Tahun 2022	094/081/11	13/05/2021	700/040/11	24/05/2021
77	Pendampingan verifikasi atas ajuan kekurangan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 bulan Desember 2020	094/088/11.I	02/06/2021	700/044/11.I	28/06/2021
78	RPJMD Tahun 2021-2026	094/089/11	18/06/2021	700/041/11	28/06/2021



No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
79	RKPD P Tahun 2021	094/091/11	12/07/2021	700/045/11/LR	29/07/2021
80	KUA PPAS P Tahun 2021 BPBD	094/112/11.I	01/09/2021	700/114/11/2021	08/09/2021
81	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Trucuk	094/113/11.I	01/09/2021	700/115/11/2021	08/09/2021
82	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Juwiring	094/114/11.I	01/09/2021	700/116/11/2021	08/09/2021
83	KUA PPAS P Tahun 2021 BLP B/J Setda	094/115/11.I	01/09/2021	700/117/11/2021	08/09/2021
84	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Karangdowo	094/116/11.I	01/09/2021	700/118/11/2021	08/09/2021
85	KUA PPAS P Tahun 2021 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	094/117/11.I	01/09/2021	700/119/11/2021	08/09/2021
86	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Klaten Selatan	094/118/11.I	01/09/2021	700/120/11/2021	08/09/2021
87	KUA PPAS P Tahun 2021 Dinas Kesehatan	094/119/11.I	01/09/2021	700/121/11/2021	08/09/2021
88	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Kemalang	094/121/11.I	01/09/2021	700/123/11/2021	08/09/2021
89	KUA PPAS P Tahun 2021 Bagian Umum	094/122/11.I	01/09/2021	700/124/11/2021	08/09/2021
90	KUA PPAS P Tahun 2021 Dispermasdes	094/123/11.I	01/09/2021	700/125/11/2021	08/09/2021
91	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Tulung	094/124/11.I	01/09/2021	700/126/11/2021	08/09/2021
92	KUA PPAS P Tahun 2021 BPKD	094/125/11.I	01/09/2021	700/127/11/2021	08/09/2021
93	KUA PPAS P Tahun 2021 DPUPR	094/126/11.II	01/09/2021	700/128/11/2021	08/09/2021
94	KUA PPAS P Tahun 2021 BKPPD	094/127/11.II	01/09/2021	700/129/11/2021	08/09/2021
95	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Ceper	094/128/11.II	01/09/2021	700/130/11/2021	08/09/2021
96	KUA PPAS P Tahun 2021 Bagian Kesra	094/129/11.II	01/09/2021	700/131/11/2021	08/09/2021
97	KUA PPAS P Tahun 2021 Dinsos P3A KB	094/130/11.II	01/09/2021	700/132/11/2021	08/09/2021
98	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Wedi	094/131/11.II	01/09/2021	700/133/11/2021	08/09/2021
99	KUA PPAS P Tahun 2021 Disperinaker	094/132/11.II	01/09/2021	700/134/11/2021	08/09/2021
100	KUA PPAS P Tahun 2021 Sekretariat DPRD	094/133/11.II	01/09/2021	700/135/11/2021	08/09/2021
101	KUA PPAS P Tahun 2021 Bag Humas Setda	094/134/11.II	01/09/2021	700/136/11/2021	08/09/2021
102	KUA PPAS P Tahun 2021 Dinas Arsipus	094/135/11.II	01/09/2021	700/137/11/2021	08/09/2021
103	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Polanharjo	094/136/11.II	01/09/2021	700/138/11/2021	08/09/2021
104	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Gantiwarno	094/137/11.II	01/09/2021	700/139/11/2021	08/09/2021
105	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Karangnongko	094/138/11.II	01/09/2021	700/140/11/2021	08/09/2021
106	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Cawas	094/139/11.II	01/09/2021	700/141/11/2021	08/09/2021
107	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Pedan	094/140/11.III	01/09/2021	700/142/11/2021	08/09/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
108	KUA PPAS P Tahun 2021 DPMPTSP	094/141/11.III	01/09/2021	700/143/11/2021	08/09/2021
109	KUA PPAS P Tahun 2021 Dinas Pertanian KPP	094/142/11.III	01/09/2021	700/144/11/2021	08/09/2021
110	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Klaten Utara	094/143/11.III	01/09/2021	700/145/11/2021	08/09/2021
111	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Kebonarum	094/144/11.III	01/09/2021	700/146/11/2021	08/09/2021
112	KUA PPAS P Tahun 2021 Kesbangpol	094/145/11.III	01/09/2021	700/147/11/2021	08/09/2021
113	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Delanggu	094/146/11.III	01/09/2021	700/148/11/2021	08/09/2021
114	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Jatinom	094/147/11.III	01/09/2021	700/149/11/2021	08/09/2021
115	KUA PPAS P Tahun 2021 Dinas Perhubungan	094/148/11.III	01/09/2021	700/150/11/2021	08/09/2021
116	KUA PPAS P Tahun 2021 Satpol PP	094/149/11.III	01/09/2021	700/151/11/2021	08/09/2021
117	KUA PPAS P Tahun 2021 DLHK	094/152/11.III	01/09/2021	700/154/11/2021	08/09/2021
118	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Prambanan	094/153/11.III	01/09/2021	700/155/11/2021	08/09/2021
119	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Jogonalan	094/154/11.III	01/09/2021	700/156/11/2021	08/09/2021
120	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Bayat	094/155/11.IV	01/09/2021	700/157/11/2021	08/09/2021
121	KUA PPAS P Tahun 2021 Disperwaskim	094/156/11.IV	01/09/2021	700/158/11/2021	08/09/2021
122	KUA PPAS P Tahun 2021 Dukcapil	094/157/11.IV	01/09/2021	700/159/11/2021	08/09/2021
123	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Manisrenggo	094/158/11.IV	01/09/2021	700/160/11/2021	08/09/2021
124	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Kalikotes	094/159/11.IV	01/09/2021	700/161/11/2021	08/09/2021
125	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Klaten Tengah	094/160/11.IV	01/09/2021	700/162/11/2021	08/09/2021
126	KUA PPAS P Tahun 2021 Bag Pembangunan Setda	094/161/11.IV	01/09/2021	700/163/11/2021	08/09/2021
127	KUA PPAS P Tahun 2021 Bappeda	094/162/11.IV	01/09/2021	700/164/11/2021	08/09/2021
128	KUA PPAS P Tahun 2021 Inspektorat	094/163/11.IV	01/09/2021	700/165/11/2021	08/09/2021
129	KUA PPAS P Tahun 2021 Disparbudpora	094/164/11.IV	01/09/2021	700/166/11/2021	08/09/2021
130	KUA PPAS P Tahun 2021 Diskominfo	094/165/11.IV	01/09/2021	700/167/11/2021	08/09/2021
131	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Wonosari	094/166/11.IV	01/09/2021	700/168/11/2021	08/09/2021
132	KUA PPAS P Tahun 2021 Dinas Pendidikan	094/167/11.IV	01/09/2021	700/169/11/2021	08/09/2021
133	KUA PPAS P Tahun 2021 Bag Perekonomian	094/168/11.IV	01/09/2021	700/170/11/2021	08/09/2021
134	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Ngawen	094/169/11.IV	01/09/2021	700/171/11/2021	08/09/2021
135	KUA PPAS P Tahun 2021 Kecamatan Karanganyam	094/170/11.IV	01/09/2021	700/172/11/2021	08/09/2021
136	RKA P Tahun 2021 BPBD	094/172/11.I	13/09/2021	700/187/11/2021	21/09/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
137	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Trucuk	094/173/11.I	13/09/2021	700/216/11/2021	21/09/2021
138	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Juwiring	094/174/11.I	13/09/2021	700/188/11/2021	21/09/2021
139	RKA P Tahun 2021 BLP B/J Setda	094/175/11.I	13/09/2021	700/189/11/2021	21/09/2021
140	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Karangdowo	094/176/11.I	13/09/2021	700/190/11/2021	21/09/2021
141	RKA P Tahun 2021 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	094/177/11.I	13/09/2021	700/191/11/2021	21/09/2021
142	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Klaten Selatan	094/178/11.I	13/09/2021	700/192/11/2021	21/09/2021
143	RKA P Tahun 2021 Dinas Kesehatan	094/179/11.I	13/09/2021	700/215/11/2021	21/09/2021
144	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Kemalang	094/181/11.I	13/09/2021	700/218/11/2021	21/09/2021
145	RKA P Tahun 2021 Bagian Umum	094/182/11.I	13/09/2021	700/193/11/2021	21/09/2021
146	RKA P Tahun 2021 Dispermasdes	094/183/11.I	13/09/2021	700/194/11/2021	21/09/2021
147	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Tulung	094/184/11.I	13/09/2021	700/195/11/2021	21/09/2021
148	RKA P Tahun 2021 BPKD	094/185/11.I	13/09/2021	700/228/11/2021	21/09/2021
149	RKA P Tahun 2021 DPUPR	094/186/11.II	13/09/2021	700/196/11/2021	21/09/2021
150	RKA P Tahun 2021 BKPPD	094/187/11.II	13/09/2021	700/217/11/2021	21/09/2021
151	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Ceper	094/188/11.II	13/09/2021	700/232/11/2021	21/09/2021
152	RKA P Tahun 2021 Bagian Kesra	094/189/11.II	13/09/2021	700/197/11/2021	21/09/2021
153	RKA P Tahun 2021 Dinsos P3A KB	094/190/11.II	13/09/2021	700/198/11/2021	21/09/2021
154	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Wedi	094/191/11.II	13/09/2021	700/230/11/2021	21/09/2021
155	RKA P Tahun 2021 Disperinaker	094/192/11.II	13/09/2021	700/199/11/2021	21/09/2021
156	RKA P Tahun 2021 Sekretariat DPRD	094/193/11.II	13/09/2021	700/227/11/2021	21/09/2021
157	RKA P Tahun 2021 Bag Humas Setda	094/194/11.II	13/09/2021	700/229/11/2021	21/09/2021
158	RKA P Tahun 2021 Dinas Arsipus	094/195/11.II	13/09/2021	700/200/11/2021	21/09/2021
159	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Polanharjo	094/196/11.II	13/09/2021	700/201/11/2021	21/09/2021
160	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Gantiwarno	094/197/11.II	13/09/2021	700/202/11/2021	21/09/2021
161	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Karangnongko	094/198/11.II	13/09/2021	700/231/11/2021	21/09/2021
162	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Cawas	094/199/11.II	13/09/2021	700/203/11/2021	21/09/2021
163	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Pedan	094/200/11.III	13/09/2021	700/226/11/2021	21/09/2021
164	RKA P Tahun 2021 DPMPTSP	094/201/11.III	13/09/2021	700/204/11/2021	21/09/2021
165	RKA P Tahun 2021 Dinas Pertanian KPP	094/202/11.III	13/09/2021	700/224/11/2021	21/09/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
166	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Klaten Utara	094/203/11.III	13/09/2021	700/223/11/2021	21/09/2021
167	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Kebonarum	094/204/11.III	13/09/2021	700/205/11/2021	21/09/2021
168	RKA P Tahun 2021 Kesbangpol	094/205/11.III	13/09/2021	700/206/11/2021	21/09/2021
169	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Delanggu	094/206/11.III	13/09/2021	700/207/11/2021	21/09/2021
170	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Jatinom	094/207/11.III	13/09/2021	700/225/11/2021	21/09/2021
171	RKA P Tahun 2021 Dinas Perhubungan	094/208/11.III	13/09/2021	700/208/11/2021	21/09/2021
172	RKA P Tahun 2021 Satpol PP	094/209/11.III	13/09/2021	700/209/11/2021	21/09/2021
173	RKA P Tahun 2021 Bag. Pemerintahan	094/210/11.III	13/09/2021	700/210/11/2021	21/09/2021
174	RKA P Tahun 2021 Bag Hukum	094/211/11.III	13/09/2021	700/211/11/2021	21/09/2021
175	RKA P Tahun 2021 DLHK	094/212/11.III	13/09/2021	700/212/11/2021	21/09/2021
176	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Prambanan	094/213/11.III	13/09/2021	700/213/11/2021	21/09/2021
177	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Jogonalan	094/214/11.III	13/09/2021	700/214/11/2021	21/09/2021
178	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Bayat	094/215/11.IV	13/09/2021	700/221/11/2021	21/09/2021
179	RKA P Tahun 2021 Disperwaskim	094/216/11.IV	13/09/2021	700/179/11/2021	21/09/2021
180	RKA P Tahun 2021 Dukcapil	094/217/11.IV	13/09/2021	700/180/11/2021	21/09/2021
181	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Manisrenggo	094/218/11.IV	13/09/2021	700/222/11/2021	21/09/2021
182	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Kalikotes	094/219/11.IV	13/09/2021	700/181/11/2021	21/09/2021
183	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Klaten Tengah	094/220/11.IV	13/09/2021	700/182/11/2021	21/09/2021
184	RKA P Tahun 2021 Bag Pembangunan Setda	094/221/11.IV	13/09/2021	700/219/11/2021	21/09/2021
185	RKA P Tahun 2021 Bappeda	094/222/11.IV	13/09/2021	700/176/11/2021	21/09/2021
186	RKA P Tahun 2021 Inspektorat	094/223/11.IV	13/09/2021	700/177/11/2021	21/09/2021
187	RKA P Tahun 2021 Disparbudpora	094/224/11.IV	13/09/2021	700/233/11/2021	21/09/2021
188	RKA P Tahun 2021 Diskominfo	094/225/11.IV	13/09/2021	700/183/11/2021	21/09/2021
189	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Wonosari	094/226/11.IV	13/09/2021	700/220/11/2021	21/09/2021
190	RKA P Tahun 2021 Dinas Pendidikan	094/227/11.IV	13/09/2021	700/184/11/2021	21/09/2021
191	RKA P Tahun 2021 Bag Perekonomian	094/228/11.IV	13/09/2021	700/178/11/2021	21/09/2021
192	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Ngawen	094/229/11.IV	13/09/2021	700/185/11/2021	21/09/2021
193	RKA P Tahun 2021 Kecamatan Karanganyar	094/230/11.IV	13/09/2021	700/186/11/2021	21/09/2021
194	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Kemalang)	094/245.1/11.I	11/10/2021	700/248/11/2021	21/10/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
195	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Tulung)	094/245.2/11.I	11/10/2021	700/249/11/2021	21/10/2021
196	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Klaten Selatan)	094/245.3/11.I	11/10/2021	700/250/11/2021	21/10/2021
197	Renstra 2021-2026 (Dinas Kesehatan)	094/245.4/11.I	11/10/2021	700/251/11/2021	21/10/2021
198	Renstra 2021-2026 (Dispermasdes)	094/245.5/11.I	11/10/2021	700/252/11/2021	21/10/2021
199	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Juwiring)	094/245.6/11.I	11/10/2021	700/253/11/2021	21/10/2021
200	Renstra 2021-2026 (Disdagkop dan UKM)	094/245.7/11.I	11/10/2021	700/254/11/2021	21/10/2021
201	Renstra 2021-2026 (BPKD)	094/245.8/11.I	11/10/2021	700/255/11/2021	21/10/2021
202	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Trucuk)	094/245.9/11.I	11/10/2021	700/256/11/2021	21/10/2021
203	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Karangdowo)	094/245.10/11.I	11/10/2021	700/257/11/2021	21/10/2021
204	Renstra 2021-2026 (Sekretariat Daerah)	094/245.11/11.I	11/10/2021	700/258/11/2021	21/10/2021
205	Renstra 2021-2026 (BPBD)	094/245.12/11.I	11/10/2021	700/259/11/2021	21/10/2021
206	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Karangnongko)	094/246.1/11.II	11/10/2021	700/260/11/2021	21/10/2021
207	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Cawas)	094/246.2/11.II	11/10/2021	700/261/11/2021	21/10/2021
208	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Ceper)	094/246.3/11.II	11/10/2021	700/262/11/2021	21/10/2021
209	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Gantiwarno)	094/246.4/11.II	11/10/2021	700/263/11/2021	21/10/2021
210	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Wedi)	094/246.5/11.II	11/10/2021	700/264/11/2021	21/10/2021
211	Renstra 2021-2026 (BKPPD)	094/246.6/11.II	11/10/2021	700/265/11/2021	21/10/2021
212	Renstra 2021-2026 (Dinas Arsip dan Perpustakaan)	094/246.7/11.II	11/10/2021	700/266/11/2021	21/10/2021
213	Renstra 2021-2026 (Sekretariat DPRD)	094/246.8/11.II	11/10/2021	700/267/11/2021	21/10/2021
214	Renstra 2021-2026 (Dispernaker)	094/246.9/11.II	11/10/2021	700/268/11/2021	21/10/2021
215	Renstra 2021-2026 (Dinas Sosial P3A KB)	094/246.10/11.II	11/10/2021	700/269/11/2021	21/10/2021
216	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Polanharjo)	094/246.11/11.II	11/10/2021	700/270/11/2021	21/10/2021
217	Renstra 2021-2026 (DPUPR)	094/246.12/11.II	11/10/2021	700/271/11/2021	21/10/2021
218	Renstra 2021-2026 (Kesbangpol)	094/247.1/11.III	11/10/2021	700/272/11/2021	21/10/2021
219	Renstra 2021-2026 (Dinas Perhubungan)	094/247.2/11.III	11/10/2021	700/273/11/2021	21/10/2021
220	Renstra 2021-2026 (DPMPTSP)	094/247.3/11.III	11/10/2021	700/274/11/2021	21/10/2021
221	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Jogonalan)	094/247.4/11.III	11/10/2021	700/275/11/2021	21/10/2021
222	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Delanggu)	094/247.5/11.III	11/10/2021	700/276/11/2021	21/10/2021
223	Renstra 2021-2026 (DLHK)	094/247.6/11.III	11/10/2021	700/277/11/2021	21/10/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
224	Renstra 2021-2026 (Satpol PP)	094/247.7/11.III	11/10/2021	700/278/11/2021	21/10/2021
225	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Prambanan)	094/247.8/11.III	11/10/2021	700/279/11/2021	21/10/2021
226	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Kebonarum)	094/247.9/11.III	11/10/2021	700/280/11/2021	21/10/2021
227	Renstra 2021-2026 (Dispertan)	094/247.10/11.III	11/10/2021	700/281/11/2021	21/10/2021
228	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Jatinom)	094/247.11/11.III	11/10/2021	700/282/11/2021	21/10/2021
229	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Pedan)	094/247.12/11.III	11/10/2021	700/283/11/2021	21/10/2021
230	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Klaten Utara)	094/247.13/11.III	11/10/2021	700/284/11/2021	21/10/2021
231	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Bayat)	094/248.1/11.IV	11/10/2021	700/285/11/2021	21/10/2021
232	Renstra 2021-2026 (Disperwaskim)	094/248.2/11.IV	11/10/2021	700/286/11/2021	21/10/2021
233	Renstra 2021-2026 (Disdukcapil)	094/248.3/11.IV	11/10/2021	700/287/11/2021	21/10/2021
234	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Manisrenggo)	094/248.4/11.IV	11/10/2021	700/288/11/2021	21/10/2021
235	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Kalikotes)	094/248.5/11.IV	11/10/2021	700/289/11/2021	21/10/2021
236	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Klaten Tengah)	094/248.6/11.IV	11/10/2021	700/290/11/2021	21/10/2021
237	Renstra 2021-2026 (Bappeda)	094/248.7/11.IV	11/10/2021	700/291/11/2021	21/10/2021
238	Renstra 2021-2026 (Inspektorat)	094/248.8/11.IV	11/10/2021	700/292/11/2021	21/10/2021
239	Renstra 2021-2026 (Disparbudpora)	094/248.9/11.IV	11/10/2021	700/293/11/2021	21/10/2021
240	Renstra 2021-2026 (Diskominfo)	094/248.10/11.IV	11/10/2021	700/294/11/2021	21/10/2021
241	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Wonosari)	094/248.11/11.IV	11/10/2021	700/295/11/2021	21/10/2021
242	Renstra 2021-2026 (Dinas Pendidikan)	094/248.12/11.IV	11/10/2021	700/296/11/2021	21/10/2021
243	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Ngawen)	094/248.13/11.IV	11/10/2021	700/297/11/2021	21/10/2021
244	Renstra 2021-2026 (Kecamatan Karangnom)	094/248.14/11.IV	11/10/2021	700/298/11/2021	21/10/2021
245	KUA PPAS Tahun 2022 BPBD	094/250/11.I	18/10/2021	700/303/11/2021	27/10/2021
246	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Trucuk	094/251/11.I	18/10/2021	700/304/11/2021	27/10/2021
247	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Juwiring	094/252/11.I	18/10/2021	700/305/11/2021	27/10/2021
248	KUA PPAS Tahun 2022 BLP B/J Setda	094/253/11.I	18/10/2021	700/306/11/2021	27/10/2021
249	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Karangdowo	094/254/11.I	18/10/2021	700/307/11/2021	27/10/2021
250	KUA PPAS Tahun 2022 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	094/255/11.I	18/10/2021	700/308/11/2021	27/10/2021
251	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Klaten Selatan	094/256/11.I	18/10/2021	700/309/11/2021	27/10/2021
252	KUA PPAS Tahun 2022 Dinas Kesehatan	094/257/11.I	18/10/2021	700/310/11/2021	27/10/2021



No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
253	KUA PPAS Tahun 2022 Bagian Organisasi	094/258/11.I	18/10/2021	700/311/11/2021	27/10/2021
254	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Kemalang	094/259/11.I	18/10/2021	700/312/11/2021	27/10/2021
255	KUA PPAS Tahun 2022 Bagian Umum	094/260/11.I	18/10/2021	700/313/11/2021	27/10/2021
256	KUA PPAS Tahun 2022 Dispermasdes	094/261/11.I	18/10/2021	700/314/11/2021	27/10/2021
257	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Tulung	094/262/11.I	18/10/2021	700/315/11/2021	27/10/2021
258	KUA PPAS Tahun 2022 BPKD	094/263/11.I	18/10/2021	700/316/11/2021	27/10/2021
259	KUA PPAS Tahun 2022 DPUPR	094/264/11.II	18/10/2021	700/317/11/2021	27/10/2021
260	KUA PPAS Tahun 2022 BKPPD	094/266/11.II	18/10/2021	700/318/11/2021	27/10/2021
261	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Ceper	094/270/11.II	18/10/2021	700/319/11/2021	27/10/2021
262	KUA PPAS Tahun 2022 Bagian Kesra	094/271/11.II	18/10/2021	700/320/11/2021	27/10/2021
263	KUA PPAS Tahun 2022 Dinsos P3A KB	094/268/11.II	18/10/2021	700/321/11/2021	27/10/2021
264	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Wedi	094/272/11.II	18/10/2021	700/322/11/2021	27/10/2021
265	KUA PPAS Tahun 2022 Disperinaker	094/267/11.II	18/10/2021	700/323/11/2021	27/10/2021
266	KUA PPAS Tahun 2022 Sekretariat DPRD	094/265/11.II	18/10/2021	700/324/11/2021	27/10/2021
267	KUA PPAS Tahun 2022 Bag Humas Setda	094/273/11.II	18/10/2021	700/325/11/2021	27/10/2021
268	KUA PPAS Tahun 2022 Dinas Arsipus	094/269/11.II	18/10/2021	700/326/11/2021	27/10/2021
269	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Polanharjo	094/274/11.II	18/10/2021	700/327/11/2021	27/10/2021
270	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Gantiwarno	094/275/11.II	18/10/2021	700/328/11/2021	27/10/2021
271	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Karangnongko	094/276/11.II	18/10/2021	700/329/11/2021	27/10/2021
272	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Cawas	094/277/11.II	18/10/2021	700/330/11/2021	27/10/2021
273	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Pedan	094/278/11.III	18/10/2021	700/331/11/2021	27/10/2021
274	KUA PPAS Tahun 2022 DPMPTSP	094/279/11.III	18/10/2021	700/332/11/2021	27/10/2021
275	KUA PPAS Tahun 2022 Dinas Pertanian KPP	094/280/11.III	18/10/2021	700/333/11/2021	27/10/2021
276	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Klaten Utara	094/281/11.III	18/10/2021	700/334/11/2021	27/10/2021
277	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Kebonarum	094/282/11.III	18/10/2021	700/335/11/2021	27/10/2021
278	KUA PPAS Tahun 2022 Kesbangpol	094/283/11.III	18/10/2021	700/336/11/2021	27/10/2021
279	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Delanggu	094/284/11.III	18/10/2021	700/337/11/2021	27/10/2021
280	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Jatinom	094/285/11.III	18/10/2021	700/338/11/2021	27/10/2021
281	KUA PPAS Tahun 2022 Dinas Perhubungan	094/286/11.III	18/10/2021	700/339/11/2021	27/10/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
282	KUA PPAS Tahun 2022 Satpol PP	094/287/11.III	18/10/2021	700/340/11/2021	27/10/2021
283	KUA PPAS Tahun 2022 Bag. Pemerintahan	094/288/11.III	18/10/2021	700/341/11/2021	27/10/2021
284	KUA PPAS Tahun 2022 Bag Hukum	094/289/11.III	18/10/2021	700/342/11/2021	27/10/2021
285	KUA PPAS Tahun 2022 DLHK	094/290/11.III	18/10/2021	700/343/11/2021	27/10/2021
286	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Prambanan	094/291/11.III	18/10/2021	700/344/11/2021	27/10/2021
287	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Jogonalan	094/292/11.III	18/10/2021	700/345/11/2021	27/10/2021
288	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Bayat	094/293/11.IV	18/10/2021	700/346/11/2021	27/10/2021
289	KUA PPAS Tahun 2022 Disperwaskim	094/294/11.IV	18/10/2021	700/347/11/2021	27/10/2021
290	KUA PPAS Tahun 2022 Dukcapil	094/295/11.IV	18/10/2021	700/348/11/2021	27/10/2021
291	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Manisrenggo	094/296/11.IV	18/10/2021	700/349/11/2021	27/10/2021
292	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Kalikotes	094/297/11.IV	18/10/2021	700/350/11/2021	27/10/2021
293	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Klaten Tengah	094/298/11.IV	18/10/2021	700/351/11/2021	27/10/2021
294	KUA PPAS Tahun 2022 Bag Pembangunan Setda	094/299/11.IV	18/10/2021	700/352/11/2021	27/10/2021
295	KUA PPAS Tahun 2022 Bappeda	094/300/11.IV	18/10/2021	700/353/11/2021	27/10/2021
296	KUA PPAS Tahun 2022 Inspektorat	094/301/11.IV	18/10/2021	700/354/11/2021	27/10/2021
297	KUA PPAS Tahun 2022 Disparbudpora	094/302/11.IV	18/10/2021	700/355/11/2021	27/10/2021
298	KUA PPAS Tahun 2022 Diskominfo	094/303/11.IV	18/10/2021	700/356/11/2021	27/10/2021
299	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Wonosari	094/304/11.IV	18/10/2021	700/357/11/2021	27/10/2021
300	KUA PPAS Tahun 2022 Dinas Pendidikan	094/305/11.IV	18/10/2021	700/358/11/2021	27/10/2021
301	KUA PPAS Tahun 2022 Bag Perekonomian	094/306/11.IV	18/10/2021	700/359/11/2021	27/10/2021
302	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Ngawen	094/307/11.IV	18/10/2021	700/360/11/2021	27/10/2021
303	KUA PPAS Tahun 2022 Kecamatan Karanganyam	094/308/11.IV	18/10/2021	700/361/11/2021	27/10/2021
304	Telaah Sejawat Intern	094/312/11.II	05/11/2021	700/363/11.II	11/11/2021
305	Telaah Sejawat Intern	094/312/11.II	05/11/2021	700/364/11.I	11/11/2021
306	Telaah Sejawat Intern	094/312/11.II	05/11/2021	700/365/11.IV	11/11/2021
307	Telaah Sejawat Intern	094/312/11.II	05/11/2021	700/366/11.III	11/11/2021
308	Telaah Sejawat Intern	094/312/11.II	05/11/2021	700/367/11	11/11/2021
309	Telaah Sejawat ekstern pada Inspektorat Kabupaten Sragen	094/314/11	05/11/2021	800/444/11	14/12/2021
310	RKA Tahun 2022 BPBD	094/316/11.I	05/11/2021	700/374/11/2021	30/11/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
311	RKA Tahun 2022 Kecamatan Trucuk	094/317/11.I	05/11/2021	700/375/11/2021	30/11/2021
312	RKA Tahun 2022 Kecamatan Juwiring	094/318/11.I	05/11/2021	700/376/11/2021	30/11/2021
313	RKA Tahun 2022 BLP B/J Setda	094/319/11.I	05/11/2021	700/377/11/2021	30/11/2021
314	RKA Tahun 2022 Kecamatan Karangdowo	094/320/11.I	05/11/2021	700/378/11/2021	30/11/2021
315	RKA Tahun 2022 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	094/321/11.I	05/11/2021	700/379/11/2021	30/11/2021
316	RKA Tahun 2022 Kecamatan Klaten Selatan	094/322/11.I	05/11/2021	700/380/11/2021	30/11/2021
317	RKA Tahun 2022 Dinas Kesehatan	094/323/11.I	05/11/2021	700/381/11/2021	30/11/2021
318	RKA Tahun 2022 Bagian Organisasi	094/324/11.I	05/11/2021	700/382/11/2021	30/11/2021
319	RKA Tahun 2022 Kecamatan Kemalang	094/325/11.I	05/11/2021	700/383/11/2021	30/11/2021
320	RKA Tahun 2022 Bagian Umum	094/326/11.I	05/11/2021	700/384/11/2021	30/11/2021
321	RKA Tahun 2022 Dispermasdes	094/327/11.I	05/11/2021	700/385/11/2021	30/11/2021
322	RKA Tahun 2022 Kecamatan Tulung	094/328/11.I	05/11/2021	700/386/11/2021	30/11/2021
323	RKA Tahun 2022 BPKD	094/329/11.I	05/11/2021	700/387/11/2021	30/11/2021
324	RKA Tahun 2022 DPUPR	094/330/11.II	05/11/2021	700/388/11/2021	30/11/2021
325	RKA Tahun 2022 BKPPD	094/331/11.II	05/11/2021	700/389/11/2021	30/11/2021
326	RKA Tahun 2022 Kecamatan Ceper	094/332/11.II	05/11/2021	700/390/11/2021	30/11/2021
327	RKA Tahun 2022 Bagian Kesra	094/333/11.II	05/11/2021	700/391/11/2021	30/11/2021
328	RKA Tahun 2022 Dinsos P3A KB	094/334/11.II	05/11/2021	700/392/11/2021	30/11/2021
329	RKA Tahun 2022 Kecamatan Wedi	094/335/11.II	05/11/2021	700/393/11/2021	30/11/2021
330	RKA Tahun 2022 Disperinaker	094/336/11.II	05/11/2021	700/394/11/2021	30/11/2021
331	RKA Tahun 2022 Sekretariat DPRD	094/337/11.II	05/11/2021	700/401/11/2021	30/11/2021
332	RKA Tahun 2022 Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda (Humas)	094/338/11.II	05/11/2021	700/396/11/2021	30/11/2021
333	RKA Tahun 2022 Dinas Arsipus	094/339/11.II	05/11/2021	700/397/11/2021	30/11/2021
334	RKA Tahun 2022 Kecamatan Polanharjo	094/340/11.II	05/11/2021	700/398/11/2021	30/11/2021
335	RKA Tahun 2022 Kecamatan Gantiwarno	094/341/11.II	05/11/2021	700/399/11/2021	30/11/2021
336	RKA Tahun 2022 Kecamatan Karangnongko	094/342/11.II	05/11/2021	700/400/11/2021	30/11/2021
337	RKA Tahun 2022 Kecamatan Cawas	094/343/11.II	05/11/2021	700/395/11/2021	30/11/2021
338	RKA Tahun 2022 Kecamatan Pedan	094/344/11.III	05/11/2021	700/402/11/2021	30/11/2021
339	RKA Tahun 2022 DPMPTSP	094/345/11.III	05/11/2021	700/403/11/2021	30/11/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
340	RKA Tahun 2022 Dinas Pertanian KPP	094/346/11.III	05/11/2021	700/404/11/2021	30/11/2021
341	RKA Tahun 2022 Kecamatan Klaten Utara	094/347/11.III	05/11/2021	700/405/11/2021	30/11/2021
342	RKA Tahun 2022 Kecamatan Kebonarum	094/348/11.III	05/11/2021	700/406/11/2021	30/11/2021
343	RKA Tahun 2022 Kesbangpol	094/349/11.III	05/11/2021	700/407/11/2021	30/11/2021
344	RKA Tahun 2022 Kecamatan Delanggu	094/350/11.III	05/11/2021	700/408/11/2021	30/11/2021
345	RKA Tahun 2022 Kecamatan Jatinom	094/351/11.III	05/11/2021	700/409/11/2021	30/11/2021
346	RKA Tahun 2022 Dinas Perhubungan	094/352/11.III	05/11/2021	700/410/11/2021	30/11/2021
347	RKA Tahun 2022 Satpol PP	094/353/11.III	05/11/2021	700/411/11/2021	30/11/2021
348	RKA Tahun 2022 Bag. Pemerintahan	094/354/11.III	05/11/2021	700/412/11/2021	30/11/2021
349	RKA Tahun 2022 Bag Hukum	094/355/11.III	05/11/2021	700/413/11/2021	30/11/2021
350	RKA Tahun 2022 DLHK	094/356/11.III	05/11/2021	700/414/11/2021	30/11/2021
351	RKA Tahun 2022 Kecamatan Prambanan	094/357/11.III	05/11/2021	700/415/11/2021	30/11/2021
352	RKA Tahun 2022 Kecamatan Jogonalan	094/358/11.III	05/11/2021	700/416/11/2021	30/11/2021
353	RKA Tahun 2022 Kecamatan Bayat	094/359/11.IV	05/11/2021	700/417/11/2021	30/11/2021
354	RKA Tahun 2022 Disperwaskim	094/360/11.IV	05/11/2021	700/418/11/2021	30/11/2021
355	RKA Tahun 2022 Dukcapil	094/361/11.IV	05/11/2021	700/419/11/2021	30/11/2021
356	RKA Tahun 2022 Kecamatan Manisrenggo	094/362/11.IV	05/11/2021	700/420/11/2021	30/11/2021
357	RKA Tahun 2022 Kecamatan Kalikotes	094/363/11.IV	05/11/2021	700/421/11/2021	30/11/2021
358	RKA Tahun 2022 Kecamatan Klaten Tengah	094/364/11.IV	05/11/2021	700/422/11/2021	30/11/2021
359	RKA Tahun 2022 Bag Pembangunan Setda	094/365/11.IV	05/11/2021	700/423/11/2021	30/11/2021
360	RKA Tahun 2022 Bappeda	094/366/11.IV	05/11/2021	700/424/11/2021	30/11/2021
361	RKA Tahun 2022 Inspektorat	094/367/11.IV	05/11/2021	700/425/11/2021	30/11/2021
362	RKA Tahun 2022 Disparbudpora	094/368/11.IV	05/11/2021	700/426/11/2021	30/11/2021
363	RKA Tahun 2022 Diskominfo	094/369/11.IV	05/11/2021	700/427/11/2021	30/11/2021
364	RKA Tahun 2022 Kecamatan Wonosari	094/370/11.IV	05/11/2021	700/428/11/2021	30/11/2021
365	RKA Tahun 2022 Dinas Pendidikan	094/371/11.IV	05/11/2021	700/429/11/2021	30/11/2021
366	RKA Tahun 2022 Bag Perekonomian	094/372/11.IV	05/11/2021	700/430/11/2021	30/11/2021
367	RKA Tahun 2022 Kecamatan Ngawen	094/373/11.IV	05/11/2021	700/431/11/2021	30/11/2021
368	RKA Tahun 2022 Kecamatan Karanganyam	094/374/11.IV	05/11/2021	700/432/11/2021	30/11/2021

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
369	Rotasi, Mutasi, dan Promosi Pegawai pada BKPPD	094/384/11.III	01/12/2021	700/452/11.III	31/12/2021
370	DAK Fisik penugasan Bid Lingkungan hidup Cad. LB3 pada DLHK Tahun 2021 (cadangan)	094/390/11.III	08/12/2021	700/446/11.III	15/12/2021
371	DAK Fisik penugasan Bid Lingkungan hidup LB3 pada DLHK Tahun 2021 tahap 2	094/397/11.III	13/12/2021	700/447/11.III	21/12/2021
372	DAK Fisik Reguler Bidang Pendiakn Sub bidang SKB tahap 3 Tahun 2021	094/391/11.IV	08/12/2021	700/445/11.IV	15/12/2021
373	DAK Sub bidang SMP tahap 3 Tahun 2021		09/12/2021	700/443/11.IV	13/12/2021
374	DAK Fisik Bidang pendidikan Sub Bidang SD tahap 3	094/399/11.IV	17/12/2021	700/450/11.IV	29/12/2021
375	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup belanja Modal Alat Sistem pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu d, Otomatis dan Online (ONLIMO)	094/400/11.III	28/12/2021	700/451/11.III	29/12/2021
376	DAK reguler bidang jalan sub bidang jalan tahap 3 TA 2021	094/399.1/11.II	24/12/2021	700/453/11.II	31/12/2021

## REKAPITULASI ADUAN DESA TAHUN 2022

NO	TANGGAL SURAT MASUK	DASAR AUDIT	RUANG LINGKUP AUDIT	Surat Perintah		Laporan		NILAI KASUS	REKOMENDASI	STATUS REKOMENDASI			KETERANGAN
				Nomor SP	Tgl SP	Nomor LHP	Tgl LHP			B	D	S	
1	07/03/2022	*Surat Masyarakat Gedongjetis, Tulung No:01/III/WARGA-GJ/2022 Tgl 2 Maret 2022 Perihal: Dugaan penyimpangan pembangunan pariwisata umbul batu tumpeng Dukuh gedong, Ds Gedongjetis, Kec Tulung  *BPD Desa Gedongjetis (Tembusan) No:14/III/BPD-GJ/2022 Tgl 2 Maret 2022 Perihal: Dugaan pelanggaran administrasi pembangunan pariwisata umbul batu tumpeng Dukuh gedong, Ds Gedongjetis, Kec Tulung	Klarifikasi dugaan pelanggaran administrasi pembangunan pariwisata Umbul Batu Tumbeng Dukuh Gedong, Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung	871/018/11/5	01/04/2022	700.6/018/11/5/2022	08/04/2022	-	Lanjut Audit Investigatif			1	
2		*BPD Desa Gedongjetis Tulung No:13/VIII/BPD.GJ/2022 Tgl 3 Agustus (Surat Masuk 5 Agustus) Perihal: Dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Gedongjetis Kec Tulung terkait Pembangunan Umbul Batu Tumpeng	Audit Investigasi dugaan pelanggaran administrasi pembangunan pariwisata Umbul Batu Tumpeng Dukuh Gedong, Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung	871/020/11/5 871/023/11/5	11/04/2022 1/7/2022	700.3/023/11/5/2022 700.3/024/11/5/2022	29/07/2022	89.288.250	1. Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai. (1.01.08) . Kepada Kepala Desa Gedongjetis agar menyetorkan selisih antara perhitungan DPUPR dengan realisasi belanja desa sebesar Rp.69.688.250,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening kas Desa. (01) 2. Barang yang dibangun tidak dapat dimanfaatkan. (3.03.03) a. Bupati Klaten melalui Camat agar memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) b. Kepala Desa Gedongjetis agar memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Kepala Urusan Perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten melalui Tenaga Ahli Kabupaten agar memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Tenaga Pendamping Profesional Desa (an.Kholil Purwanto,ST) selaku konsultan perencana pembangunan Pariwisata Umbul Batu Tumpeng Dukuh Gedong, Desa Gedongjetis, Kecamatan Tulung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) d. Kepala Desa agar memerintahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk dilakukan pembenahan total konstruksi/bangunan Pariwisata Umbul Batu Tumpeng Dukuh Gedong, Desa Gedongjetis, Kecamatan Tulung. (9) 3. Belanja modal tidak sesuai ketentuan (1.01.09) . Kepala Desa agar memerintahkan konsultan Masterplan I untuk mengembalikan pembayaran DED sebesar Rp. 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening kas Desa. (01)		1	5	
3	23/03/2022	Surat FORMAS PP No:19/FORMAS.PP/III/2022 Tgl 23 Maret 2022 Perihal : Laporan pengaduan tata kelola keuangan Ds. Ponggok Kec. Polanharjo								1			
4	08/04/2022	Surat dari Slamet Komarudin Tgl 6 April 2022 Perihal : Keabsahan Keputusan Kepala Desa tentang Proses Rencana Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022 di Desa Wonosari, Kec Trucuk, Kab Klaten	Klarifikasi atas pengaduan masyarakat Desa Wonosari tentang Keabsahan Keputusan Kepala Desa tentang Proses Rencana Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022 di Desa Wonosari, Kec Trucuk, Kab Klaten	871/027/11/5	27/07/2022	700.3/027/11/5/2022	19/08/2022					1	tidak terbukti kebenarannya



5	25/04/2022	Surat dari Widodo Cs Tgl 17 April 2022 Hal : Aduan Aparat Desa Sawit, Kec. Gantiwarno								1			
6	27/04/2022	Surat dari Warno Tinoyo (Warga Kec. Jatinom) Hal : Hak Waris								1			
7	13/07/2022	Diskominfo No:045.2/400/21 Tgl 26 Juni 2022 Hal:Laporan Masyarakat melalui Kanal Lapor Gub (Desa Kadilanggon tg bantuan Traktor Besar dari Dinas Pertanian Kab Klaten)	Telah dilakukan klarifikasi terkait laporan tersebut oleh Kepala Desa Kadilanggon dengan kesimpulan balasan surat dari Camat Kecamatan Wedi Nomor T/010.2/202/34.3 Tanggal 28 Juli 2022									1	tidak terbukti kebenarannya
8	27/07/2022	Diskominfo No:045.2/440/21 Tgl 18 Juli 2022 Hal:Laporan Masyarakat melalui Kanal Lapor Gub (Ds Kenaiban-Juwiring, Ds kadilanggon-Wedi)	Telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Klaten-Kecamatan Juwiring dengan surat pemberitahuan jawaban aduan tersebut dengan Nomor : B/111.3.1/221/34.14 Tanggal 19 september 2022									1	tidak terbukti kebenarannya
9	08/08/2022	Diskominfo No:045.2/481/21 Tgl Agustus 2022 Hal:Laporan Masyarakat melalui Kanal Lapor Gub (A.n. Adam Gilang Al Arkhan Ds Brangkal-Karanganom)								1			
10	10/08/2022	Inspektorat Prov. Jateng No:337/1816/IRBANSUS/2022 Tgl 4 Agustus 2022 Hal:Laporan Masyarakat melalui Kanal Lapor Gub (dari Sdr. Gigih Anggara jati Ds Kenaiban Juwiring)	Telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Klaten-Kecamatan Juwiring dengan surat pemberitahuan jawaban aduan tersebut dengan Nomor : B/111.3.1/221/34.14 Tanggal 19 september 2022									1	tidak terbukti kebenarannya
11	10/10/2022	Surat dari Muhammad Resha Atmadatu Juseli Perihal:Pengaduan terkait Gor Gelarsena Klaten	Pengaduan dugaan pungli oleh pengurus Gor Gelarsena Klaten					5.100.000	1. Mengembalikan uang senilai Rp5.100.00,00 kepada penyewa GOR yang sebelumnya dikenal tarif melebihi ketentuan. (Rp 8.100.000 – 3.000.000), dan segera menyetorkan uang sewa senilai Rp3.000.000,00 ke Kas Daerah. 2. Memberikan Instruksi kepada pengelola GOR Gelarsena agar mengenakan tarif sewa Gedung sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Memublikasikan daftar tarif dan mekanisme sewa/pemakaian GOR Gelarsena Klaten di media-media publikasi milik Disbudporapar baik di website resmi, akun media sosial resmi, maupun papan publikasi lainnya. 4. Menyusun kebijakan yang memberikan penjelasan tambahan mengenai ketentuan bahwa pertandingan olahraga yang bersifat komersial (penyewa mengenakan pembayaran tiket masuk Gedung untuk menyaksikan pertandingan) dikategorikan sebagai kegiatan pertunjukan tontonan. 5. Memberikan penjelasan yang memadai kepada penyewa dan pengadu bahwa Disbudporapar tidak melakukan dan mentoleransi segala jenis pungutan liar kepada masyarakat/pengguna layanan.			5	



12	07/01/2022	Surat Diskominfo No : 045.2/857/21 tgl 21 Desember 2021 Perihal Laporan Masyarakat melalui Kanal Lapor Gub	Klarifikasi aduan masyarakat melalui portal laporgub terkait pungli/tarikan distribusi pasar yang dilakukan Oknum Lurah Pasar Srago	871/009/11/5	01/03/2022	700.6/008/1 1/5/2022	21/03/2022					1	Tidak perlu ditingkatkan menjadi audit investigatif.
13	16/02/2022	Surat Lembaga Layar Lentera Rakyat (LALER) No : 001/SL/LALER/II/2021 Tgl 14 Feb 2022 Perihal : Laporan Dugaan Maladministrasi Proyek Pengadaan barang di Dinas	Klarifikasi atas dugaan Mal Administrasi Proyek Pengadaan Barang Di Dinas Pendidikan Kab Klaten	871/008/11/5	01/03/2022	700.6/007/1 1/5/2022	16/03/2022		memberikan rekomendasi untuk diadakan audit investigatif terkait Mal Administrasi Proyek Pengadaan Barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Kiaten.			1	
14			Audit Investigatif atas dugaan Mal Administrasi Proyek Pengadaan Barang Di Dinas Pendidikan Kab Klaten	871/017/11/5	09/03/2022	700.3/014/1 1/5/2022	01/04/2022		Bupati Kiaten untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kiaten agar memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Pembinaan SD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK0m) dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Peralatan TIK (DAK Bidang Pendidikan) kedepannya agar menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) sebagai upaya implementasi kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;		1		
15	18/02/2022	Surat Endang Wahyu Trihanani No : - Tgl 14 Feb 2022 Perihal : Pengaduan perihal harta peninggalan ayahnya (alm. Sunaryadi) Ds Dengkeng Kec Wedi	Klarifikasi aduan masyarakat Desa Dengkeng tentang tidak ditindaklanjutnya permohonan warga terkait keterangan asal usul harta peninggalan alm sunaryani olek Kades Dengkeng Kec Wedi	871/010/11/5	01/03/2022	700.6/010/1 1/5/2022	23/03/2022					1	tidak benar

16	27/12/2021	Surat Pemerintah Desa Tangkisanpos, Kec Jogonalan No : 002/012/2021 Tgl 20 Des 2021 Perihal : Laporan dan Permohonan	Klarifikasi atas laporan kegiatan yang tidak terealisasi TA. 2019 pada desa Tangkisanpos Kec Jogonalan	871/001/11/5	07/01/2022	700.3/002/1 1/5/2022	31/01/2022		diperlukan penugasan berikutnya berupa <b>Audit Investigatif</b> guna memberikan keyakinan secara memadai berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			1	
17			Audit Investigatif atas dugaan laporan keuangan bantuan keuangan kab Klaten atas pembelian Sound System th 2019 sebesar 40.000.000 dan bantuan pembelian kursi untuk PKK th 2018 sebesar 10.000.000	871/006/11/5	08/02/2022	700.3/006/1 1/5/2022 700.3/009/1 1/Kl.2/2022	16/03/2022 22/3/2022	41.382.000	1. Kekurangan volume pekerjaan pembelian kursi PKK tahun 2018. (1.01.03) Memerintahkan kepada mantan Kepala Desa Tangkisanpos periode 2013-2019 (An.Triawan Yuniato) agar mengembalikan uang atas kekurangan belanja kursi PKK bantuan keuangan Kabupaten Kiaten tahun 2018 sebesar Rp.5.982.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). (01) 2. Pembelian Sound System tahun 2019 tidak direalisasikan/dilaksanakan: (1 .01 .01) Memerintahkan kepada mantan Kepala Desa Tangkisanpos periode 2013-2019 (An.Triawan Yuniato) agar mengembalikan uang atas belanja Sound System bantuan keuangan Kabupaten Kiaten tahun 2019 sebesar sebesar Rp.35.400000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). (01)			2	
										4	2	21	



Klaten, 9 November 2022  
Pit. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KLATEN

AGUS BETYAWAN P, S.STP, M.Hum  
NIP.19770627 199703 1 003